



**ANALISIS DETERMINAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN
AKUNTABILITAS PADA BANK SYARIAH DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh :

Diyah Ayu Mahmudah

NIM 7211415087

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020



**ANALISIS DETERMINAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN
AKUNTABILITAS PADA BANK SYARIAH DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh :

Diyah Ayu Mahmudah

NIM 7211415087

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia skripsi

pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Agustus 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA
NIP. 198309012008121002

Pembimbing

Hasan Mukhibad, S.E., M.Si
NIP. 198112222014041001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 18 September 2020

Penguji I



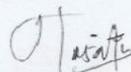
Drs. Asrori, M.S.
NIP. 196005051986011001

Penguji II



Prabowo Yudo Jayanto, S.E., M.S.A.
NIP. 198205072008121005

Penguji III



Hasan Mukhibad, S.E., M.Si
NIP. 198112222014041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D.
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diyah Ayu Mahmudah

NIM : 7211415087

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 18 Januari 1997

Alamat : Ds.Gadudero Poncomulyo RT 07/02, Kec.Sukolilo
Kab.Pati

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya.

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 13 Agustus 2020



Diyah Ayu Mahmudah

NIM 7211415087

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesudah kesulitan itu kemudahan.” (QS. Al Insyirah 5-6)
- “Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda”.(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN:

Puji syukur kepada ALLAH SWTatas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Orang tua terbaikku Ibu Sukemi dan Bapak Ajik Sumarno yang dalam kerja kerasnya senantiasa mendoakan dan memberi motivasi;
- ❖ Kakakku (Anita Rahayuningrum), kakak ipar (M.Aris) adikku (Siska Aulia Putri) dan keponakanku (Defia Afshinal Husna) yang selalu memberi semangat, dukungan dan menjadi penghibur;
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku Rifa Arifah Yasmin, Amalia Riski W, Jumik & Jumanto, adek kos adem ayem. Terima kasih untuk bantuan,

dukungan, serta kebersamaan yang menakjubkan;

- ❖ Teman-teman akuntansi D 2015;
- ❖ Almamaterku Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Determinan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Akuntabilitas pada Bank Syariah di Indonesia ”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak yang selama ini membantu penulis. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M. Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto., MBA.,PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Kiswanto, S.E.,M.Si.,CMA.,CIBA.,CERA selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
4. Hasan Mukhibad, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi, dan saran kepada Penulis.
5. Prabowo Yudho Jayanto, S.E., M.S.A selaku Dosen Wali Akuntansi D 2015 yang telah mendampingi Penulis mulai dari awal hingga akhir studi di Universitas Negeri Semarang.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

7. Keluarga yang telah mendoakan , memberi semangat, dan dukungan selama Penulis menyusun skripsi.
8. Teman-teman Akuntansi D 2015, teman-teman sebimbingan, dan semua pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman Penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan untuk meningkatkan kualitas penulisan di masa yang akan datang. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terutama bagi pembaca.

Semarang, 13 Agustus 2020

Penulis

SARI

Diyah Ayu Mahmudah. 2020. “Analisis Determinan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Akuntabilitas pada Bank Syariah di Indonesia”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Hasan Mukhibad, S.E.,M.Si.

Kata Kunci: *Disclosure Accountability, Profitabilitas, Leverage, Investment Account Holder, Size, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris.*

Financial, social and sharia disclosure accountability merupakan tiga pilar komprehensif pengungkapan akuntabilitas yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan bank syariah. Pelaporan sosial syariah menggunakan indeks ISR maupun CSR belum sepenuhnya dapat mengungkap informasi tanggung jawab sosial secara menyeluruh termasuk didalamnya tema keuangan dan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage, investment account holder, size*, dewan pengawas syariah, dewan komisaris terhadap pengungkapan akuntabilitas.

Populasi pada penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2018 sebanyak 14 bank syariah. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian berjumlah 8 bank syariah dengan 64 unit analisis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang diperoleh bersumber dari website masing-masing bank syariah. Analisis data pada penelitian ini diawali dengan analisis statistik deskriptif kemudian dilakukan analisis regresi data panel menggunakan Eviews 9.

Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa *size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan akuntabilitas. Profitabilitas, *leverage, investment account holder*, dewan pengawas syariah, dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel *size* yang berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas maka peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan objek penelitian serta variabel lain.

ABSTRACT

Diyah Ayu Mahmudah. 2020. “ Analysis of Determinants of Factors that affect the Disclosure of Accountability in Islamic Bank in Indonesia”. Thesis. Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor: Hasan Mukhibad,S.E.,M.Si.

Keywords: Disclosure Accountability, Profitability, Leverage, Investment Account Holder, Size, Sharia Supervisory Board, Board of Commisioners.

Financial, sosial and sharia disclosure accountability are the three comprehensive pillars of disclosure that need to be disclosed in sharia bank financial statement. Islamic social reporting using the ISR index or CSR has not been able to fully disclose information on social responsibility as a whole, including financial and Islamic themes. The aim of this research is to examine the effect of profitability, leverage, investment account holder, size, sharia supervisory board, board of commisioners on the disclosure accountability.

The subjects of the study are Islamic banks in Indonesia during a period of 2011-2018, there are 14 Islamic banks. The sampling technique in this study used a purposive sampling technique. By employing purposive sampling, there are 8 sharia banks as research samples and 64 analysis units. The technique of collecting data in this study used documentation. The data were darived from website of those sharia banks. Meanwhile, the analysis used descriptive statistical analysis and panel regression analysis with Eviews9.

The results showed that size positive and significant impact on the disclosure accountability. Profitability, leverage, investment account holder, sharia supervisory board, board of commisioners have no effect on the disclosure accountability.

Based on the results, variable size that impact on the disclosure accountability, the researcher suggests that for the further research can add research objects and other variables.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAGAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vii
SARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	18
1.3 Cakupan Masalah.....	18
1.4 Perumusan Masalah.....	20
1.5 Tujuan Penelitian.....	20
1.6 Manfaat Penelitian.....	21
1.7 Orisinilitas Penelitian.....	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN.....	23
2.1 Kajian Teori Utama.....	23
2.1.1 <i>Syariah Enterprise Theory</i>	23

2.1.2 <i>Stakeholder Theory</i>	26
2.1.3 <i>Signalling Theory</i>	29
2.1.4 Teori Keagenan.....	31
2.2 Kajian Variabel Penelitian.....	33
2.2.1 Pengungkapan Akuntabilitas.....	33
2.2.2 Profitabilitas.....	42
2.2.3 <i>Leverage</i>	43
2.2.4 Ukuran Perusahaan.....	45
2.2.5 <i>Islamic Account Holder</i>	46
2.2.6 Dewan Pengawas Syariah.....	48
2.2.7 Dewan Komisaris.....	49
2.3 Penelitian Terdahulu.....	51
2.4 Kerangka Berfikir dan Hipotesis Penelitian.....	58
2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas	58
2.4.2 Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas	59
2.4.3 Pengaruh <i>Investment Account Holder</i> Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas.....	61
2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas	62
2.4.5 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas.....	64

2.4.6 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas.....	66
2.4 Hipotesis Penelitian.....	68
BAB III METODE PENELITIAN.....	70
3.1 Jenis dan Desain Penelitian.....	70
3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	70
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	72
3.3.1 Pengungkapan Akuntabilitas.....	72
3.3.2 Profitabilitas.....	77
3.3.3 Leverage.....	78
3.3.4 Ukuran Perusahaan.....	78
3.3.5 <i>Investment Account Holder</i>	79
3.3.6 Dewan Pengawas Syariah.....	79
3.3.7 Dewan Komisaris.....	80
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	82
3.5 Metode Analisis Data.....	82
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	83
3.5.2 Tahapan Regresi Data Panel.....	83
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	87
3.5.4 Uji Kelayakan Model.....	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	92
4.1 Hasil Penelitian.....	92
4.1.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	92

4.1.2 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	97
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	104
4.1.4 Hasil Uji Hipotesis Penelitian.....	105
4.2 Pembahasan.....	111
4.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas	111
4.2.2 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas	113
4.2.3 Pengaruh <i>Investment Account Holder</i> Terhadap Akuntabilitas Akuntabilitas.....	115
4.2.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas.....	116
4.2.5 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas.....	118
4.2.6 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas.....	119
BAB V PENUTUP.....	121
5.1 Kesimpulan.....	121
5.2 Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rata-Rata Tingkat Pengungkapan Akuntabilitas Bank Syariah.....	7
Tabel 2.1 <i>Financial Disclosure Index</i>	37
Tabel 2.2 <i>Social Disclosure Index</i>	39
Tabel 2.3 <i>Sharia Disclosure Index</i>	40
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	51
Tabel 3.1 Rangkuman Hasil Proses Pengambilan Sampel.....	71
Tabel 3.2 Data Sampel Penelitian.....	72
Tabel 3.3 <i>Financial Disclosure Index</i>	74
Tabel 3.4 <i>Social Disclosure Index</i>	75
Tabel 3.5 <i>Sharia Disclosure Index</i>	75
Tabel 3.6 Penyusunan Operasional Variabel.....	80
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	92
Tabel 4.2 Estimasi <i>Common Effect Model</i>	98
Tabel 4.3 Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	99
Tabel 4.4 Estimasi <i>Random Effect Model</i>	101
Tabel 4.5 Chow Test.....	102
Tabel 4.6 Uji Hausman.....	103
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas.....	104
Tabel 4.8 Uji Heterokedastisitas-Uji White.....	105
Tabel 4.9 Regresi Data Panel-Random Effect Model.....	106

Tabel 4.10 Koefisien Determinasi.....	108
Tabel 4.11 Hasil Uji T.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	68
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN.....	128
Lampiran 1 Data Perusahaan Sampel Penelitian.....	129
Lampiran 2 Data Tabulasi Pengungkapan Akuntabilitas.....	129
Lampiran 3 Data Tabulasi Profitabilitas.....	131
Lampiran 4 Data Tabulasi <i>Leverage</i>	133
Lampiran 5 Data Tabulasi <i>Investment Account Holder (IAH)</i>	135
Lampiran 6 Data Tabulasi Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>).....	137
Lampiran 7 Data Tabulasi Dewan Pengawas Syariah.....	139
Lampiran 8 Data Tabulasi Dewan Komisaris.....	141
Lampiran 9 Tabulasi <i>Content Analysis Financial Disclosure</i>	143
Lampiran 10 Tabulasi <i>Content Analysis Social Disclosure</i>	144
Lampiran 11 Tabulasi <i>Content Analysis Sharia Disclosure</i>	146
Lampiran 12 Hasil Output Eviews 9 Untuk Statistik Deskriptif.....	147
Lampiran 13 Hasil Output Eviews 9 Untuk <i>Common Effect Model</i>	148
Lampiran 14 Hasil Output Eviews 9 Untuk <i>Fixed Effect Model</i>	148
Lampiran 15 Hasil Output Eviews 9 Untuk <i>Random Effect Model</i>	149
Lampiran 16 Hasil Output Eviews 9 Untuk <i>Chow Test</i>	149
Lampiran 17 Hasil Output Eviews 9 Untuk Uji Hausman.....	149
Lampiran 18 Hasil Output Eviews 9 Untuk Uji Multikolinearitas.....	150
Lampiran 19 Hasil Output Eviews 9 Untuk Uji Heterokedastisitas.....	150

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Berdasarkan data *global religious futures* jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 209,12 juta jiwa atau setara 87,17% dari total penduduk yang mencapai 263,9 juta jiwa. Islam mempengaruhi cara muslim melakukan kehidupan mereka, termasuk dalam kegiatan bisnis. Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam tersebut sangat memperhatikan prinsip halal dan haram dalam setiap kegiatan maupun dalam memperoleh sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Ketentuan tersebut disampaikan melalui Al-Quran dan hadis yang diyakini umat Islam sebagai pedoman hidup di dunia sebagai bekal menuju tempat yang lebih hakiki yaitu akhirat. Al-Quran juga mengatur syarat-syarat dari transaksi keuangan, salah satunya yaitu pelarangan praktik riba.

Islam mengajarkan cara berbisnis yang baik sesuai dengan prinsip syariah serta memiliki lebih banyak pengaruh dalam akuntansi di tingkat pengungkapan (pelaporan keuangan) daripada pengukuran, karena tingkat pengukuran akuntansi dasar secara fundamental mirip dengan sistem konvensional (Baydoun dan Willet, 1997 dalam Sherif *et al.*, 2018). Akuntansi Islam yang diterapkan di perusahaan memiliki tanggung jawab kepada Allah dan masyarakat dalam melaporkan laporan keuangannya. Akibatnya dari perpektif Islam, penekanannya pada pengungkapan yang tepat daripada teknik pengukuran.

Industri keuangan syariah saat ini telah berkembang sangat pesat terutama pada bidang perbankan. Bank syariah pertama didirikan pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan bank syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan memicu kuatnya tuntutan atas pelaksanaan akuntabilitas perbankan. Tuntutan keterbukaan dalam proses manajemen membutuhkan pola akuntabilitas yang dibangun melalui sistem akuntansi, agar dapat memberikan peluang terhadap peningkatan penyediaan informasi yang handal, akurat dan terpercaya.

Bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan pada praktik dan prinsip yang dianut serta perbedaan sistem hukum dimana bank syariah mematuhi hukum Islam. Perbankan syariah berlandaskan prinsip syariah yang setiap kebijakan, strategi yang digunakan dan tata kelola serta produk yang dihasilkan bertujuan selaras dengan syariah. Tujuan yang ingin dicapai dalam ekonomi Islam adalah mencapai *falah* (kemenangan dunia dan akhirat) dan *mashlahah* (menciptakan kehidupan yang lebih baik). Akibatnya ada perbedaan dalam penyajian laporan keuangan dan pengungkapan akuntabilitas antara bank syariah dan bank konvensional.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip pokok *corporate governance*. Prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik GCG yang baik adalah keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggung jawab (*responsibility*). Prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa “kerangka pengelolaan perusahaan harus memastikan pedoman strategis suatu perusahaan, pengawasan efektif atas

pengelolaan dewan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham” (Khairandy dan Malik, 2007). Dalam prinsip akuntabilitas, terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan perusahaan di bidang administrasi keuangan bukan hanya kepada pemegang saham saja tetapi kepada semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu dalam Islam, akuntabilitas manusia mencakup pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lingkungan, sehingga mereka harus mengungkapkan informasi, yang dapat membantu mengungkapkan akuntabilitas tersebut.

Pengungkapan memiliki arti bahwasanya informasi diungkapkan dengan jelas, akurat, lengkap, dapat dipercaya dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya pada suatu perusahaan. Pengungkapan akuntabilitas dapat dikategorikan ke dalam pengungkapan wajib atau sukarela (Rachmawati, 2016). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan item-item dalam laporan keuangan yang diwajibkan oleh BAPEPAM-LK melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-38/PM/1996 kemudian direvisi dalam peraturan BAPEPAM No.Kep-134/BL/2006 pada tanggal 7 Desember 2006 dan Ikatan Akuntan Indonesia (Rachmawati, 2016). Sementara itu, Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas Suwardjono, (2017) sehingga merupakan informasi tambahan untuk persyaratan hukum saja.

Pengungkapan akuntabilitas pada bank Islam menurut Sherif *et al.*, (2018) memiliki tiga pilar komprehensif akuntabilitas yang perlu diungkapkan pada laporan keuangan. Tiga pilar komprehensif pengungkapan akuntabilitas tersebut

meliputi akuntabilitas keuangan, akuntabilitas sosial dan akuntabilitas syariah. Penelitian tentang tiga pilar pengungkapan akuntabilitas pertama kali dilakukan oleh Sherif *et al.*, (2018). Penelitian yang dikembangkan oleh sherif sebelumnya dipublikasikan pada tahun 2015 mengenai pengungkapan akuntabilitas sosial kemudian pada tahun 2016 tentang pemenuhan kepatuhan standar AAOIFI dan yang terbaru pada tahun 2019 mengenai pengungkapan akuntabilitas syariah.

Pengungkapan akuntabilitas keuangan berarti sejauh mana laporan keuangan dapat mencerminkan informasi kinerja keuangan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. Pengungkapan akuntabilitas keuangan sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan dikarenakan pengungkapan tersebut memberikan informasi untuk mengurangi ketidakpastian dan mendukung mereka untuk membuat keputusan yang terbaik (Sherif *et al.*, 2018). Keunikan bank Islam membutuhkan lebih banyak pengungkapan keuangan mengenai kegiatan operasional mereka. Bank syariah diharapkan mampu menanggapi keinginan pemangku kepentingan melalui kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan utama pelaporan keuangan untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan dan fluktuasi posisi keuangan perusahaan yang berguna bagi pemangku kepentingan.

Pengungkapan sosial tercermin dari sejauh mana bank melayani masyarakat serta membayar zakat dan qard hasan berdasarkan laporan CSR dan pernyataan sosial di seluruh bagian laporan tahunan. Konsep akuntabilitas sosial dalam Islam telah mengakibatkan konsep pengungkapan penuh, dimana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui tentang efek dari kegiatan dan operasional perusahaan

(Baydoun dan Willet, 1997; Maali *et.al* 2006). CSR bank syariah berbeda dengan bank konvensional, karena CSR bank syariah tidak hanya berfokus pada persepsi ekonomi melainkan menggabungkan nilai-nilai spiritual yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah.

Pengungkapan akuntabilitas syariah untuk bank syariah didukung dan disetujui melalui Dewan Pengawas Syariah (Albarak dan Sherif, 2019). Pengungkapan akuntabilitas syariah merupakan tingkat pengungkapan mengenai kepatuhan syariah melalui laporan Dewan Pengawas Syariah serta indikator kepatuhan syariah pada seluruh bagian laporan tahunan. Albarak dan Sherif,(2019) menyatakan bahwa tanggung jawab agama adalah pengaruh utama dalam berinteraksi dengan bank syariah. Kepatuhan dengan akuntabilitas agama menciptakan keunggulan kompetitif untuk seluruh kategori lembaga keuangan Islam. Salah satu target penting pelaporan dari sudut pandang Islam adalah untuk memastikan kegiatan operasional bisnis bertanggung jawab dan mengikuti pedoman Islam (Maali *et.al.*, 2006).

Sherif *et al.*, (2018) menyatakan bahwa Integrasi antara pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah dapat diketahui dengan cara melihat bank syariah dari tiga perspektif. Pertama sebagai lembaga keuangan yang mencari keuntungan dan meningkatkan kekayaan pemiliknya, yang kedua dilihat sebagai lembaga yang bertujuan memainkan peran sosial dan mendukung komunitasnya, dan yang terakhir sebagai lembaga keuangan yang bertujuan menerapkan nilai syariah dalam transaksi keuangannya. Ketiga perspektif tersebut dapat dicapai melalui pengungkapan penuh akuntabilitas. Kegagalan untuk mengungkapkan

salah satu dari tiga aspek dapat mempengaruhi kredibilitas bank syariah dan citranya di depan klien. Sehingga pengungkapan adalah cara untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas terpenuhi dari laporan kinerja keuangan yang dipublikasikan oleh bank syariah.

Data statistik Perbankan Syariah Desember 2019 menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia berjumlah 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah, 34 Unit Usaha Syariah dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Semakin berkembangnya perbankan syariah, semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap masyarakat, karena dengan banyaknya jaringan kantor pelayanan perbankan syariah menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap bank syariah mulai meningkat sehingga perbankan syariah harus menyajikan laporan keuangan yang dapat memuat informasi sesuai dengan prosedur perbankan syariah.

Berdasarkan studi empiris penelitian terdahulu menemukan bahwa kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia masih rendah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, bahwa bank syariah di Indonesia masih lemah dalam memberikan pembiayaan sosial (Mukhibad, 2018). Data Bank Indonesia 2017 menunjukkan bahwa rasio pembiayaan sosial hanya sebesar 2,6% dari seluruh pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Masih rendahnya kinerja sosial perbankan syariah juga dapat diindikasikan dari rendahnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Farook *et al.*, 2011). Selain pengungkapan sosial yang masih rendah, terdapat pengungkapan keuangan dan syariah yang perlu dikaji lebih lanjut untuk

mengetahui seberapa besar tingkat pengungkapan keuangan dan pengungkapan syariah yang dilakukan perbankan syariah terhadap laporan keuangan dan syariahnya serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan.

Sherif *et al.*, (2018) menyatakan bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang tiga pilar komprehensif akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah) pada bank syariah dalam satu penelitian. Berdasarkan kesenjangan literatur pada penelitian pengungkapan tiga pilar komprehensif tersebut, Sherif *et al.*,(2018) mengembangkan tiga indeks untuk mengukur pengungkapan tentang akuntabilitas bank syariah terkait dengan CSR, SSBR dan laporan keuangan. Penelitian pertamanya dilakukan pada tahun 2016 dan penelitian kedua dilakukan pada tahun 2018 dengan perbedaan pada jumlah sampel. Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah masih terbatas pada dua penelitian saja.

Tabel 1.1 Rata-Rata Tingkat Pengungkapan Akuntabilitas Bank Syariah

No	Peneliti	Pengungkapan		
		Keuangan	Sosial	Syariah
1.	Ousama dan Fatima (2010)	-	-	17%
2.	El-Halaby dan Husainey (2015)	-	26%	-
3.	El-Halaby dan Husainey (2016)	73%	27%	68%
4.	Sherif <i>et al.</i> , (2018)	81%	28%	40%
5.	Albarak dan Sherif (2019)	-	-	53%
6.	Farook <i>et al.</i> , (2011)	-	17%	-
7.	Pratama <i>et al.</i> , (2018)	-	60,44%	-
8.	Rama (2014)	-	35%	-
9.	Sofyani <i>et al.</i> , (2012)	-	65%	-
10.	Santoso dan Haq (2017)	-	46,39%	-

Sumber : data sekunder yang diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa fenomena pengungkapan akuntabilitas bank syariah dengan sample bank syariah yang tersebar di beberapa negara masih kurang terbuka kepada publik. Terdapat dua penelitian yang meneliti mengenai pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah secara bersamaan yang dilakukan oleh El-Halaby dan Husainey (2016) dan Sherif *et al.*, (2018). Pengungkapan akuntabilitas sosial di Indonesia dengan menggunakan indeks ISR pada beberapa penelitian memiliki hasil yang masih rendah dan kurang informatif. Pengungkapan sosial dapat dikategorikan menjadi 4 yaitu sangat informatif: 81%-100%, informatif: 66%-80%, kurang informatif: 51%-65%, tidak informatif: 0%-50% (Wahyuni,2018). Penelitian Pratama *et al.*, (2018), Sofyani *et al.*, (2012) memiliki hasil pengungkapan dengan kategori kurang informatif, sedangkan penelitian Rama (2014), Santoso dan Haq (2017) memiliki hasil penelitian pengungkapan akuntabilitas sosial dibawah 51% dan dikategorikan tidak informatif. Belum banyak penelitian yang mengungkapakan 3 pilar komprehensif pengungkapan akuntabilitas bank syariah secara bersamaan. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pengungkapan akuntabilitas bank syariah dengan objek bank syariah di Indonesia.

Penelitian tentang pengungkapan tiga pilar komprehensif akuntabilitas yang mencakup (syariah, sosial, keuangan) oleh Sherif *et al.*, (2018) secara kritis mengevaluasi tingkat praktik pengungkapan Bank Islam tentang akuntabilitasnya melalui laporan tahunan dan situs web untuk semua pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian tersebut berupaya untuk mengeksplorasi hubungan antara tingkat

pengungkapan tentang pilar akuntabilitas dan karakteristik khusus bank menggunakan standar akuntansi; profitabilitas; *leverage* dan ukuran perusahaan.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, *investment account holder*, *size*, dewan pengawas syariah, dewan komisaris terhadap pengungkapan akuntabilitas. Penelitian ini akan menguji apakah profitabilitas, *size* perusahaan, *leverage* , *investment account holder* , dewan pengawas syariah, ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial, dan syariah pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Profitabilitas merupakan rasio kemampuan perusahaan memperoleh laba selama periode tertentu (Munawir, 2007). Menganalisis profitabilitas merupakan hal yang sangat penting bagi para investor maupun kreditor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan untuk melihat keefektivan manajemen suatu perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Semakin tinggi profitabilitas berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga akan semakin luas pengungkapan yang dilakukan perusahaan (Sutapa dan Laksito, 2018).

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan akuntabilitas menunjukkan hasil yang beragam. El-Halaby dan Hussainey, (2016) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan. Hasil tersebut didukung oleh (Kasih, 2018; Yusof, 2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Penelitian tersebut

berbeda hasilnya dengan penelitian (Albarak dan Sherif, 2019) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan ROA berpengaruh terhadap salah satu pengungkapan akuntabilitas, yaitu akuntabilitas syariah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh temuan dari (Kurniawati dan Yaya, 2017; Pratama *et al.*, 2018; Rahman dan Bukair, 2013; Sherif *et al.*, 2018; Affandi dan Nursita, 2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas sosial yang diukur menggunakan indeks ISR.

Tingkat leverage digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajiban kepada pihak lain. Perusahaan harus menjelaskan kepada investor, kreditor atau pihak lain yang berkepentingan mengenai kemampuan mereka untuk membayar hutang dan dampak pinjaman tersebut dalam kegiatan perusahaan. Pengungkapan ini bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi dan ketidakpastian mengenai prospek perusahaan dimasa mendatang dan bertujuan memberikan keyakinan pada kreditor bahwa perusahaan tidak melanggar *covenants* (perjanjian) yang ada. Teori agensi menyatakan bahwa tingkat pengungkapan informasi keuangan meningkat ketika leverage perusahaan tumbuh (Jensen dan Meckling, 1976).

Penelitian tentang pengaruh leverage terhadap pengungkapan akuntabilitas bank syariah dengan menggunakan salah satu pengungkapan akuntabilitas yaitu mengungkapkan akuntabilitas sosial yang diukur menggunakan ISR menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial ISR (Juhmani, 2014). Penelitian (Mukhibad, 2018; Pratama *et al.*, 2018) menemukan hal yang serupa bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan. Hasil penelitian

berbeda dengan Sherif *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh (Rosiana *et al.*, 2015; Kasih 2018; Affandi dan Nursita, 2019) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial yang diukur menggunakan indeks ISR.

Investment Account Holders (IAH) merupakan struktur kepemilikan pada perbankan syariah yang dananya bersumber dari nasabah. Archer *et al.*, (1998) menyatakan bahwa meskipun nasabah tidak memiliki hak suara dalam menentukan kebijakan perusahaan, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham. Hal ini disebabkan karena keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dari dana nasabah (Farook *et al.*, 2011). Semakin tinggi proporsi IAH dari dana pemegang saham maka akan meningkatkan pengawasan terhadap bank syariah untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Sehingga IAH diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan akuntabilitas bank syariah.

Penelitian tentang pengaruh *Investment Account Holder* (IAH) terhadap salah satu pilar komprehensif pengungkapan akuntabilitas yaitu akuntabilitas sosial dengan menggunakan pengungkapan *Islamic Social Reportung* (ISR) oleh (Farook, *et al.*, 2011; Yusoff *et al.*, 2018) menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Berbeda dengan hasil penelitian (Abdullah *et al.*, 2013; Zanjabil dan Adityawarman, 2015) yang menyatakan bahwa IAH berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sosial dengan ISR sebagai variabel dependennya.

Ukuran perusahaan dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nilai total aset perusahaan dapat diperoleh dari laporan posisi keuangan pada akhir periode perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan. Nilai total asset perusahaan dapat dilihat pada bagian aktiva dalam laporan keuangan perusahaan (Umiyati dan Baiquni, 2018). Berdasarkan prinsip syariah, bank syariah yang lebih besar harus berkontribusi lebih banyak pada kegiatan masyarakat, serta mengungkapkan informasi tentang kinerja keuangan mereka yang dapat memberikan informasi tambahan dalam laporan tahunan untuk mengungkapkan akuntabilitas mereka kepada semua kelompok pemangku kepentingan, (Sherif *et al.*, 2018).

Penelitian (Nuraeni dan Rini, 2019; Sherif *et al.*, 2018; El-Halaby dan Hussainey, 2016) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan akuntabilitas bank syariah. Penelitian tersebut berbeda hasilnya dengan Juhmani, (2014) yang menyatakan bahwa ukuran bank tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas syariah. Hasil penelitian Juhmani, (2014) didukung oleh Affandi dan Nursita, (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu indikator dalam tata kelola berprinsip syariah. DPS memiliki peran penting dalam suatu tata kelola perusahaan dalam Bank Umum Syariah terkait kewenangan dalam memberikan masukan dan memperingatkan pihak manajemen perbankan syariah tentang pengelolaan serta kebijakan manajemen berkaitan dengan kepatuhan pada prinsip syariah (Marharani dan Yulianto, 2016).

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009/tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah.

Penelitian pengaruh DPS terhadap pengungkapan syariah memberikan hasil positif signifikan terhadap pengungkapan syariah, (El-Halaby dan Hussainey, 2016). Penelitian tersebut didukung oleh (Nuraeni dan Rini, 2019; Kasih, 2018; Yusoff, 2018) yang menyatakan bahwa DPS berpengaruh terhadap pengungkapan. Penelitian tersebut tidak sama hasilnya dengan (Rosiana *et al.*, 2015; Sunarto, 2016) yang mengungkapkan bahwa tugas dan wewenang DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas sosial *Islamic Social Reporting*.

Dewan Komisaris adalah elemen penting dalam mekanisme corporate governance. Adanya dewan komisaris di dalam perusahaan diharap akan mampu mendorong terciptanya sistem pengendalian yang baik didalam manajemen perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengawasan dalam suatu perusahaan akan semakin baik (Kurniawati dan Yaya, 2017).

Pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan akuntabilitas bank syariah memiliki hasil yang berbeda, Kurniawati dan Yaya (2017) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas sosial bank syariah yang diukur menggunakan *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian tersebut sama hasilnya dengan penelitian (Mukhibad, 2018; Indrawaty dan Wardayati, 2016) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian tersebut

tidak sama dengan penelitian (Hasanah *et al.*, 2017 ; Rizfani dan Lubis, 2018) yang mengungkapkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas sosial yang menggunakan indeks ISR.

Berdasarkan *syariah enterprise theory* bahwasanya Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu (Triyuwono, 2007). Allah adalah pihak dengan posisi yang paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan akhir bagi kehidupan manusia, dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka akan terbentuk tali penghubung antara akuntansi syariah dengan sistem perekonomian. Manajemen yang mengelola bank syariah harus bisa menjadikan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi yang artinya bahwa bank syariah dapat memberikan pertanggungjawabannya kepada Allah dengan menjalankan kegiatan operasional sesuai prinsip-prinsip syariah. Selain itu, bank syariah harus bisa memberikan kemaslahatan kepada umat supaya entitas tersebut tidak diragukan dan mendatangkan keuntungan bagi umat serta perusahaan itu sendiri. Bank syariah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dapat dilakukan melalui *annual report* yang diterbitkan dengan mengungkapkan akuntabilitasnya pada setiap bagian laporan keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada Allah serta *stakeholder*. Pengungkapan akuntabilitas pada *annual report* bisa dijadikan sebagai bentuk komunikasi antara *stakeholder* dengan perbankan dimana *stakeholder* dapat memperoleh informasi yang diperlukan melalui *annual report* yang diterbitkan.

Teori *stakeholder* menjelaskan tentang keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan *stakeholder* baik dari internal maupun eksternal dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap *stakeholder*

yang ada untuk mencapai tujuan yang mendatangkan kebermanfaatan bersama (Lindawati dan Puspita, 2015) . DPS dan dewan komisaris yang merupakan pihak internal memiliki perannya masing-masing untuk memberikan pertanggungjawaban tugasnya terhadap *stakeholder*. DPS bertanggungjawab memastikan kegiatan operasional bank sesuai prinsip syariah dan memastikan kehalalan suatu produk perbankan. Berbeda dengan dewan komisaris yang bertujuan untuk mengawasi kebijakan yang dibuat oleh direksi dan juga mengawasi urusan perseroan secara umum. Oleh karena itu DPS dan dewan komisaris diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mendatangkan kebermanfaatan bersama bagi perusahaan dan *stakeholder* yang lainnya.

Stakeholder eksternal membutuhkan informasi mengenai kemampuan bank dalam memberikan kredit nya mengingat bank merupakan lembaga penghimpun dan penyalur dana, oleh sebab itu *leverage* perusahaan memberikan pengaruh terhadap keputusan kreditur. Pengungkapan tanggung jawab keuangan, sosial dan syariah merupakan strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk mendapatkan kepercayaan dari kreditur terkait kepatuhan bank umum syariah serta kemampuannya dalam memberikan kredit.

Peneliti menambahkan variabel *islamic account holder* karena menurut Yusoff, (2018) variabel *islamic account holder* mampu mempengaruhi pengungkapan akuntabilitas. Menurut teori *stakeholder*, IAH merupakan pihak eksternal yang memiliki peran untuk perusahaan karna IAH merupakan nasabah yang melakukan transaksi keuangan. Perbankan memperoleh dana dari nasabah untuk menghimpun dana yang kemudian di salurkan kepada peminjam kredit. Oleh

karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut apakah variabel profitabilitas, *leverage*, *size*, *islamic account holder* dewan pengawas syariah dan dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas (sosial, syariah keuangan) pada perbankan di Indonesia.

Signalling theory menurut Brigham dan Houston (2011) merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen suatu perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek perusahaan. Berdasarkan teori sinyal, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya dengan mengirimkan sinyal melalui laporan tahunannya. Semakin banyak berita bagus (*good news*) dalam pelaporan terhadap profitabilitas perusahaan maka semakin baik prospek kinerja perusahaan di masa depan terhadap pengungkapan keuangan, sosial dan syariahnya.

Ukuran perusahaan berhubungan dengan teori agensi dimana teori agensi dilakuakn dengan tujuan menghindari terjadinya konflik yang terjadi antara agen dan *principal*. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi seluruh item perusahaan, antara lain jumlah pegawai, jumlah produksi, pendapatan perusahaan dan sebagainya. Stakeholder diharapkan mendapatkan informasi yang lengkap, dan untuk mendapatkan informasi lengkap tersebut tidak terlepas dari hubungan teori keagenan, yang dimana teori keagenan tersebut berisikan perjanjian antara agen kepada *principal* untuk selalu memberikan semua informasi mengenai keadaan perusahaan tanpa adanya permainan dari manajer.

Pemilihan objek penelitian perbankan di Indonesia karena penelitian sebelumnya belum ada yang mengkaji lebih lanjut pengungkapan akuntabilitas

yang menggunakan metode indeks CSR, SSBR dan Financial yang dikembangkan sherif *et al.*, (2018) secara bersamaan dalam pengungkapan akuntabilitas di Indonesia. Penelitian sebelumnya banyak yang menggunakan indeks CSR maupun ISR dalam mengungkapakan pengungkapan akuntabilitas dari perbankan. Oleh karena itu peneliti bermaksud mengkaji lebih lanjut pengaruh variabel yang telah ditentukan terhadap pengungkapan akuntabilitas (sosial, syariah dan keuangan) pada perbankan syariah di Indonesia untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan akuntabilitas dan seberapa tinggi pengungkapan yang telah dilakukan oleh masing-masing bank syariah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa pengaruh dari beberapa variabel terhadap pengungkapan akuntabilitas bank syariah yang meliputi pengungkapan keuangan, sosial dan syariah masih inkonsisten. Hasil temuan tersebut menjadi ruang untuk melakukan pengujian kembali dengan melakukan pengembangan atau perubahan model. Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat dan adanya *research gap* antara penelitian terdahulu pada latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud untuk menguji kembali seberapa besar pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *investment account holder*, dewan pengawas syariah dan dewan komisaris terhadap pengungkapan akuntabilitas bank syariah. Peneliti menetapkan “**Analisis Determinan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas pada Bank Syariah di Indonesia**” sebagai judul penelitian.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penelitian pengungkapan akuntabilitas bank syariah yang meliputi pengungkapan keuangan, sosial dan syariah masih kurang terbuka untuk masyarakat.
2. Penelitian yang mengkaji tiga pilar komprehensif pengungkapan akuntabilitas secara bersamaan hanya dilakukan oleh El-Halaby dan Hussainey, (2016) dan Sherif *et al.*, (2018).
3. Terbatasnya penelitian yang mengkaji pengungkapan keuangan, sosial dan syariah secara bersamaan.
4. Penelitian pengungkapan akuntabilitas yang mencakup tiga pilar komprehensif pengungkapan masih belum ditemukan pada penelitian di Indonesia.
5. Penelitian lebih banyak berfokus pada pengungkapan akuntabilitas sosial.

1.3 Cakupan Masalah

Fokus penelitian ini adalah untuk mempelajari faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengungkapan akuntabilitas bank syariah di Indonesia yang meliputi pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah. *Holistic disclosure checklist* yang dikembangkan oleh El-Halaby *et al.*, (2018) digunakan untuk mengukur pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, ukuran bank, *leverage*, *islamic account holder* , dewan

pengawas syariah dan dewan komisaris. Sampel dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang ada di Indonesia dengan rentang waktu 8 tahun 2011-2018.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan akuntabilitas ?
2. Bagaimana pengaruh leverage terhadap pengungkapan akuntabilitas ?
3. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan akuntabilitas ?
4. Bagaimana pengaruh *Islamic Account Holder* (IAH) terhadap pengungkapan akuntabilitas ?
5. Bagaimana pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan akuntabilitas ?
6. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan akuntabilitas ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan akuntabilitas.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan akuntabilitas.

3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan akuntabilitas.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Islamic Account Holder* (IAH) terhadap pengungkapan akuntabilitas.
5. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan akuntabilitas.
6. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan akuntabilitas.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

a) Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan akuntabilitas pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2018, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang sama.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan standar dalam mengatur pengungkapan akuntabilitas perbankan syariah di Indonesia. Manfaat yang lainnya dapat membantu investor dan manajemen menganalisis kinerja keuangan

perbankan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dari pengungkapan kuantabilitas tersebut.

1.7 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memodifikasi penelitian yang dilakukan oleh Sherif *et al.*, (2018) yang meneliti pengungkapan keuangan, sosial dan syariah pada bank syariah. Penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, *Investment Account Holder* (IAH), Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris. Orisinalitas penelitian adalah pengukuran dewan pengawas syariah menggunakan variabel dummy dengan tiga indikator yang meliputi jumlah DPS, tingkat pendidikan DPS, dan latar belakang pendidikan DPS. Penelitian oleh Sherif *et al.*, (2018) tidak menggunakan tiga indikator pengukuran sebagai variabel dummy nya. Penelitian ini menambahkan variabel *investment account holder*, serta dewan komisaris yang berbeda dengan penelitian Sherif *et al.*, (2018) dimana penelitian tersebut tidak menggunakan variabel *investment account holder* dan dewan komisaris. Penelitian ini menggunakan jumlah data penelitian dengan periode delapan tahun yaitu tahun 2011-2018. Penelitian Sherif *et al.*, (2018) menggunakan jumlah data penelitian 1 tahun periode yaitu tahun 2016.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Teori Utama

2.1.1 *Syariah Enterprise Theory*

Syariah Enterprise Theory (SET) adalah teori yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu dan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta (Triyuwono, 2011). Manusia hanya sebagai wakilnya (*khalifatullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia dan alam semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya.

SET menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik nilai materi dengan nilai spiritual. Bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah menunaikan zakat dan kemudian di metafora akan menjadi “metafora zakat”. Zakat secara implisit mengandung nilai egoistik altruistik materi spiritual dan individu sosial. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini adalah SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu tetapi juga peduli terhadap pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu Allah, manusia, dan alam.

Allah merupakan *stakeholder* yang paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia, menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi maka tali

penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” bagi penyaji dan para pengguna tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah menjadikan sunnatullah sebagai basis konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah dengan sunnatullah akuntansi syariah dibangun berdasarkan tata aturan atau hukum-hukum Allah.

Stakeholder kedua dari SET adalah manusia. *Stakeholder* dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct stakeholder* dan *indirect stakeholder*. *Direct stakeholder* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non keuangan (*non financial contribution*), mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan. Sedangkan *indirect stakeholder* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik dalam bentuk keuangan maupun non keuangan tetapi secara syariah mereka adalah termasuk pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Golongan stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah Pihak yang memberikan kontribusi bagi mati hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia, perusahaan menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam dan lain-lainnya. Alam tidak menghendaki kontribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan

berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam pencegahan pencemaran dan lain-lainnya (Triyuwono, 2011)

Syariah Enterprise Theory (SET) merupakan teori yang tepat untuk mengungkapkan akuntabilitas syariah bank Islam. Hal ini dikarenakan dalam *Syariah Enterprise Theory* Allah adalah sumber amanah utama. Setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, maka sudah semestinya setiap perbuatan manusia selaras dengan aturan-aturannya. Konsep SET menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu.

Relevansi teori dengan pengungkapan akuntabilitas adalah bahwa manajemen sebagai pihak yang menjalankan operasional perbankan memiliki tanggungjawab kepada Allah sebagai *stakeholder* pertama sehingga seluruh kegiatan operasional harus sesuai dengan prinsip Islam dan memberi kebermanfaatan bagi semua pihak. Akuntabilitas perbankan syariah ditunjukkan melalui penerimaan dana zakat yang dikeluarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah yang disalurkan secara langsung kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bisa dilihat dari melalui laporan keuangan yang disajikan dimana perusahaan akan mengungkapkan sumber penerimaan zakat yang diperolehnya disertai alokasi distribusi zakat tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Pengungkapan pendapatan non halal pada *annual report* juga merupakan akuntabilitas manajemen kepada Allah sebagai *stakeholder* pertama dan pemangku kepentingan yang lainnya sesuai aturan Islam dimana pihak manajemen melaporkan sumber pendapatan non halalnya tersebut tidak diakui sebagai laba

perusahaan dan digunakan sebagai dana kebajikan untuk kegiatan sosial perusahaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan lingkungan alam dengan pelestarian ekosistem.

2.1.2 *Stakeholder Theory*

Istilah *stakeholder* pertama kali dikenalkan oleh *Standford Research Institute* (SRI) pada tahun 1963 oleh Richard Edward Freeman dan mulai dipublikasikan tahun 1984. Freeman (1984) dalam Lindawati dan Puspita (2015), mendefinisikan *stakeholder* sebagai sebuah organisasi, grup atau individu yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi tujuan organisasi tersebut. Kemudian, Freeman (2010) dalam Lindawati dan Puspita (2015) menambahkan bahwa :

“The stakeholder concept was originally defined as “those groups without whose support the organization would cease to exist.” The list of stakeholder originally included shareowners, employees, customers, suppliers, lenders and society.”

Lindawati dan Puspita, (2015) mengemukakan alasan perkembangan teori *stakeholder* yang diawali dengan perubahan bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktifitas usaha. Budiman *et.al.*, (2008) dalam Lindawati dan Puspita (2015) menyebutkan terdapat dua bentuk pendekatan stakeholder yaitu *old corporate relation* dan *new corporate relation*. Perbedaan mendasar kedua pendekatan tersebut dari bentuk pelaksanaan aktifitas perusahaan.

Old corporate relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktifitas perusahaan yang terpisah dari setiap fungsi dalam perusahaan melakukan pekerjaannya. Berkaitan dengan hubungan terhadap pihak di luar perusahaan hanya

bersifat jangka pendek dan sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerja sama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Pendekatan ini menimbulkan banyak konflik karena secara tidak langsung perusahaan memisahkan diri dari stakeholder internal maupun eksternal perusahaan.

New corporate relation, menekankan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh *stakeholdernya* baik dari internal yang dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama untuk saling membantu demi kemajuan perusahaan maupun eksternal perusahaan yang bersifat kemitraan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Sehingga, pendekatan *new corporate relation* tidak mengeksklusifkan diri dalam hubungannya dengan para *stakeholdernya*.

Lindawati dan Puspita (2015) menyimpulkan bahwa teori stakeholder merupakan teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan stakeholder baik dari internal maupun eksternal dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada untuk mencapai tujuan yang mendatangkan kebermanfaatan bersama. Hal ini memberikan gambaran bahwa perusahaan dalam beroperasi tidak hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan harus memberikan kebermanfaatan kepada stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, karyawan, kreditor, debitor, pemegang saham, dan lain-lain. Teori *stakeholder* pada penelitian ini digunakan untuk menerangkan hubungan antara variabel dewan pengawas syariah, dewan komisaris, *investment account holder* dan leverage, *size* terhadap pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah bank syariah.

Teori *Stakeholder* dalam penelitian ini mengimplikasi pada variabel Dewan Pengawas Syariah. Semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah dalam bank syariah, maka akan semakin memudahkan untuk mengendalikan manajemen puncak dan semakin efektif dalam pelaksanaan monitoring (Mukhibad, 2018). DPS mempunyai tanggung jawab memastikan setiap produk, layanan, kegiatan operasional bank dan laporan keuangan sesuai prinsip syariah dan ketentuan DSN MUI. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan akuntabilitas, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkan tanggung jawabnya sesuai prinsip syariah baik tanggung jawab keuangan, sosial maupun syariah.

Teori *Stakeholder* diduga bisa menjelaskan pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan akuntabilitas. Dewan komisaris sebagai wakil dari *stakeholder* memiliki peran sebagai pengawas setiap perencanaan dan pelaksanaan keputusan direksi. Artinya peranan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya diperlukan sebagai tanggung jawabnya menjadi wakil dari *stakeholder* di dalam perusahaan. Semakin banyak dewan komisaris di dalam perusahaan maka semakin mudah bagi *stakeholder* mengetahui akuntabilitas yang diungkapkan perusahaan.

Teori stakeholder di duga mampu mempengaruhi *Investment Account Holder* (IAH) terhadap pengungkapan akuntabilitas. IAH yang merupakan nasabah memberikan kontribusinya terhadap perbankan dalam bentuk tabungan maupun giro tabungan. Nasabah memerlukan transparansi informasi laporan tahunan manajemen untuk mengetahui akuntabilitasnya dalam mengelola zakat dan sejauh

mana pertanggungjawabannya dalam mengelola CSR serta kondisi keuangan perbankan. Informasi tersebut diperlukan karena IAH yang beragama Islam akan sangat memperhatikan setiap produk, layanan dan kegiatan operasional perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Teori stakeholder mampu mempengaruhi leverage perusahaan terhadap pengungkapan akuntabilitas. Tingkat *leverage* yang tinggi maka perusahaan akan berusaha untuk menjaga kepercayaan dari kreditor serta membangun *image* yang baik dimata masyarakat dan *stakeholdernya*. Salah satu upaya untuk menyeimbangkan tuntutan dari *stakeholder* adalah mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan serta mengungkapkan kinerja keuangannya yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, bahwa stakeholder dapat mempengaruhi besarnya pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial dan syariah) dalam perusahaan. Para stakeholder memiliki hak untuk mengetahui semua informasi, baik *mandatory* atau *voluntary*. Teori *stakeholder* juga menyatakan bahwa *stakeholder* sebagai pengambil keputusan muslim mengharapkan perusahaan mengungkapkan akuntabilitasnya berbasis syariah, sehingga membuktikan perusahaan beroperasi sesuai hukum islam.

2.1.3 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Signalling theory menurut Brigham dan Houston (2011) merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen suatu perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek perusahaan.

Signalling theory menjelaskan alasan perusahaan menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar sebab perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor). Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar yaitu berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.

Godfrey *et al.*, (2010) menjelaskan, ada konsekuensi logis dari teori sinyal, bahwa ada insentif bagi semua manajer yang memberikan sinyal mengenai keuntungan yang diperoleh dimasa depan karena jika investor mempercayai sinyal tersebut, maka harga saham akan meningkat dan pemegang saham akan mendapatkan keuntungan. Jika pengumuman tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham.

Perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih banyak dari yang diharapkan karena hal ini terkait dengan pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan. Informasi tersebut disajikan dalam laporan tahunan berupa laporan keuangan dan laporan tambahan. Laporan keuangan memuat informasi terkait kondisi keuangan perusahaan yaitu salah satunya informasi profitabilitas atau laba perusahaan. Pengungkapan laporan tambahan berisi informasi non keuangan

seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan yaitu pengungkapan informasi kegiatan sosial perusahaan.

Teori sinyal pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel profitabilitas terhadap pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah pada perbankan syariah. Berdasarkan teori sinyal, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya dengan mengirimkan sinyal melalui laporan tahunannya. Semakin banyak berita bagus (*good news*) dalam pelaporan terhadap laba perusahaan maka semakin baik prospek kinerja perusahaan di masa depan terhadap pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariahnya. Hal ini akan ditangkap sebagai sinyal positif oleh investor sebab perusahaan mendapatkan penilaian yang baik dimata investor melalui peningkatan transaksi permintaan saham yang tercermin dari kenaikan harga saham dan maningkatnya nilai perusahaan.

2.1.4 Teori Keagenan

Jensen dan Mackling (1976) mengemukakan bahwa teori keagenan merupakan konsep yang menggambarkan antara agen dan *principal* (*shareholders*) dalam model kontraktual antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak yang lain disebut *principal*. Agen disebut juga sebaga pihak pengelola, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh *principal*. Perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manjernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya, oleh karena itu di dalam teori agensi dikenal kontrak kerja. Kontrak kerja tersebut mengatur proporsi *utilitas* masing-masing pihak dengan tetap

memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan maupun risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen.

Hubungan antara agen dan prinsipal berawal dari adanya korporasi yang memisahkan dengan tegas antara kepemilikan pihak perusahaan dan pihak manajemen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk melakukan layanan atas nama mereka serta melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Namun, hubungan diantara manajemen dan pemegang saham tersebut menimbulkan adanya perbedaan kepentingan sehingga terjadi konflik yang disebut sebagai konflik keagenan (*agency theory*).

Konflik keagenan ini terjadi karena agen dan prinsipal memiliki tujuan yang berbeda, pemegang saham menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi yang mereka buat sedangkan manajemen menginginkan bonus atau imbalan besar atas kinerjanya. Sehingga hal tersebut dapat memicu terjadinya asimetri informasi. Asimetri ini timbul karena adanya kondisi dimana manajer sebagai pengelola perusahaan atau penyedia informasi lebih banyak memahami kondisi internal perusahaan daripada pengguna informasi.

Akibat adanya asimetri tersebut, dapat menimbulkan permasalahan, Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat dua permasalahan yang timbul, yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak sehingga fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
2. *Moral Hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman sehingga manajer dapat melanggar kontrak dari *shareholder*.

Teori keagenan dapat menjelaskan hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial dan syariah) perbankan. Ukuran perusahaan berhubungan dengan teori agensi dimana teori agensi dilakukan dengan tujuan menghindari terjadinya konflik yang terjadi antara agen dan *principal*. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi seluruh item perusahaan, antara lain jumlah pegawai, jumlah produksi, pendapatan perusahaan dan sebagainya. Stakeholder diharapkan mendapatkan informasi yang lengkap, dan untuk mendapatkan informasi lengkap tersebut tidak terlepas dari hubungan teori keagenan, yang dimana teori keagenan tersebut berisikan perjanjian antara agen kepada *principal* untuk selalu memberikan semua informasi mengenai keadaan perusahaan tanpa adanya permainan dari manajer.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Pengungkapan Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan tanggung jawab pemimpin dalam mengelola perusahaannya serta tanggung jawab dalam membuat keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Prinsip akuntabilitas tersebut digunakan sebagai sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris. Prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa “kerangka pengelolaan perusahaan harus memastikan pedoman strategis suatu perusahaan, pengawasan efektif atas pengelolaan dewan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham” (Khairandy dan Malik, 2007) Dalam prinsip akuntabilitas, terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan perusahaan di bidang administrasi keuangan bukan hanya kepada pemegang saham saja tetapi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas dalam perspektif Islam muncul dari konsep khalifah yang menganggap manusia sebagai pemimpin di muka bumi dengan selalu menggunakan pedoman al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Akuntabilitas kedua terjadi karena suatu perjanjian antara pemilik atau investor dengan manajer, pada tataran prakteknya akuntabilitas erat kaitannya dengan transparansi laporan keuangan. Akuntabilitas mencerminkan bahwa segala bentuk pertanggungjawaban yang diusung oleh perusahaan benar-benar berdasarkan kenyataan riil yang terjadi dalam perusahaan tidak ada yang ditutupi apalagi dimanipulasi. Semuanya diharapkan sesuai dengan semangat kejujuran dan nilai-nilai syariah.

Akuntabilitas berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang dilihat dari konsep kepemilikan, seperti tertera dalam surat Thaha ayat 6 :

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Artinya: “*kepunyaan-Nyalah semua yang ada dilangit, semua yang ada dibumi, semua yang ada diantara keduanya, dan semua yang ada dibawah tanah*”

Pertanggungjawaban begitu ditekankan dengan perintah Allah melalui istilah hisab atau perhitungan (akuntabilitas) dihari pembalasan. Adanya akuntabilitas akan membuat perusahaan lebih memperhatikan tanggungjawabnya kepada stakeholder, lingkungan dan Tuhan.

Pengungkapan memiliki arti bahwasanya informasi diungkapkan dengan jelas, akurat, lengkap, dapat dipercaya dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya pada suatu perusahaan. Harahap, (2007) menyatakan secara umum ada tiga tiga pengertian pengungkapan (*disclosure*) yaitu :

1. *Full Disclosure*

Pengungkapan penuh adalah pengungkapan yang harus dilakukan secara menyeluruh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan.

2. *Adequate Disclosure*

Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar informasi yang diberikan tidak menyesatkan bagi penggunanya untuk proses pengambilan keputusan.

3. *Fair Disclosure*

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang harus dicapai agar informasi didapat oleh semua pihak adalah sama.

Rachmawati, (2016) menyatakan bahwa didalam laporan keuangan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*) terdapat dua tipe pengungkapan :

1. Pengungkapan wajib

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan bagian-bagian laporan keuangan yang didalamnya diwajibkan oleh BAPEPAM dan LK melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-38/PM/1996 kemudian direvisi dalam peraturan BAPEPAM No.KEP-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 dan Ikatan Akuntansi Indonesia.

2. Pengungkapan sukarela

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan publik sebagaimana tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela yang termasuk dalam kategori ini adalah pengungkapan tambahan terkait informasi keuangan perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan; kedua pengungkapan sukarela perusahaan ini seringkali diungkapkan dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*) walaupun sekarang ini cukup banyak perusahaan yang menerbitkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang terpisah dari laporan tahunan (*annual report*) dalam bentuk laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Sherif *et al.*, (2018) yang mengkategorikan pengungkapan (*disclosure*) kedalam tiga pilar komprehensif pengungkapan akuntabilitas dan masing-masing pengungkapan mempunyai indeks

pengukuran pengungkapan akuntabilitas. Tiga pilar pengungkapan akuntabilitas tersebut, yaitu :

1. *Financial Accountability*
2. *Social Accountability*
3. *Shariah Accountability*

2.2.1.1 Financial Accountability

Akuntabilitas keuangan berarti sejauh mana laporan keuangan dapat mencerminkan informasi kinerja keuangan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. Pengungkapan akuntabilitas keuangan sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan dikarenakan pengungkapan tersebut memberikan informasi untuk mengurangi ketidakpastian dan mendukung mereka untuk membuat keputusan yang terbaik (Sherif *et al.*, 2018). Keunikan bank Islam membutuhkan lebih banyak pengungkapan keuangan mengenai kegiatan operasional mereka. Bank syariah diharapkan mampu menanggapi keinginan pemangku kepentingan melalui kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan utama pelaporan keuangan untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan dan fluktuasi posisi keuangan perusahaan yang berguna bagi pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengungkapan Akuntabilitas keuangan, berikut indeks pengungkapan pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Financial Disclosure Index

No	Item yang diungkapkan	Sumber data	Referensi
1.	Laporan keuangan komparatif	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
2.	Informasi dasar tentang bank	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018

No	Item yang diungkapkan	Sumber data	Referensi
3.	Pengungkapan mata uang yang digunakan untuk pengukuran akuntansi	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
4.	Pengungkapan kebijakan akuntansi yang signifikan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
5.	Pengungkapan penghasilan atau pengeluaran yang dilarang syariah	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
6.	Pengungkapan tentang aset dan kewajiban risk	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
7.	Pengungkapan contingences	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
8.	Pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
9.	Penyajian dan pengungkapan posisi keuangan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
10.	Penyajian dan pengungkapan laporan laba rugi	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
11.	Pengungkapan laporan arus kas	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
12.	Laporan perubahan ekuitas pemilik	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
13.	Laporan perubahan dana investasi terikat	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
14.	Pengungkapan dalam pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat dan sedekah	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
15.	Pengungkapan dalam pernyataan sumber dan penggunaan dana, dana pinjaman (Qard Hasan Fund)	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018

Sumber : Sherif *et al.*,2018

2.2.1.2 Social Accountability

Akuntabilitas sosial tercermin dari sejauh mana bank melayani masyarakat serta membayar zakat dan qard hasan berdasarkan laporan CSR dan pernyataan sosial di seluruh bagian laporan tahunan. Konsep akuntabilitas sosial dalam Islam telah mengakibatkan konsep pengungkapan penuh, dimana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui tentang efek dari kegiatan dan operasional perusahaan

(Baydoun dan Willet, 2000; Maali *et al.*, 2006). CSR bank syariah berbeda dengan bank konvensional, karena CSR bank syariah tidak hanya berfokus pada persepsi ekonomi melainkan menggabungkan nilai-nilai spiritual yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah. Berikut tabel 2.2 merupakan indeks pengungkapan akuntabilitas sosial untuk pengukuran tingkat akuntabilitas:

Tabel 2.2
Social Disclosure Index

No	Item yang diungkapkan	Sumber data	Referensi
1.	Kesejahteraan karyawan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
2.	Kebijakan pelestarian lingkungan internal	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
3.	Layanan pelanggan par excellence	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
4.	Pembayaran yang terlambat dan klien yang bangkrut dan menghindari persyaratan yang memberatkan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
5.	Qard hasan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
6.	Usaha mikro dan kecil dan tabungan sosial dan investasi dan pembangunan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
7.	Menyaring dan memberi tahu klien untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
8.	Zakat	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
9.	Aktivasi amal	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
10.	Manajemen wakaf	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
11.	Tanggung jawab sosial	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018

Sumber : Sherif *et al.*, 2018

2.2.1.3 Sharia Accountability

Akuntabilitas syariah untuk bank syariah didukung dan disetujui melalui Dewan Pengawas Syariah (Albarak dan Sherif, 2019). Pengungkapan akuntabilitas

syariah merupakan tingkat pengungkapan mengenai kepatuhan syariah melalui laporan Dewan Pengawas Syariah serta indikator kepatuhan syariah pada seluruh bagian laporan tahunan. Albarak dan Sherif, (2019) menyatakan bahwa tanggung jawab agama adalah pengaruh utama dalam berinteraksi dengan bank syariah. Kepatuhan dengan akuntabilitas agama menciptakan keunggulan kompetitif untuk seluruh kategori lembaga keuangan Islam. Salah satu target penting pelaporan dari sudut pandang Islam adalah untuk memastikan kegiatan operasional bisnis bertanggung jawab dan mengikuti pedoman Islam (Maali *et al.*, 2006). Berikut tabel 2.3 merupakan indeks pengungkapan akuntabilitas syariah untuk pengukuran tingkat akuntabilitas:

Tabel 2.3
Sharia Disclosure Index

No	Item yang diungkapkan	Sumber data	Referensi
1.	Nama anggota dewan syariah	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
2.	Penjelasan singkat tentang setiap anggota di dewan syariah (latar belakang dan kualifikasi)	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
3.	Jumlah anggota dewan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
4.	Gambar anggota dewan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
5.	Posisi administrasi dewan syariah dalam struktur organisasi	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
6.	Peran dan tanggung jawab dewan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
7.	Otoritas dewan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
8.	Departemen audit syariah bank	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
9.	Rekening pertemuan dewan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
10.	Situs web atau laporan tahunan yang mengungkapkan Fatwa untuk dewan Syariah terkait dengan layanan Islam	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018

No	Item yang diungkapkan	Sumber data	Referensi
11.	Apakah website mengungkapkan peran dewan untuk menyebarkan kesadaran tentang pemikiran perbankan Islam	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
12.	Laporan DPS ditugaskan dari anggota dewan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
13.	Informasi tentang tanggung jawab bank atas zakat	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
14.	Informasi tentang tanggung jawab bank atas kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah dan bagaimana bank menghadapinya	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
15.	Informasi tentang bagaimana proses distribusi laba di bank mematuhi prinsip syariah	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
16.	Informasi tentang independensi dewan DPS dengan bagan yang menunjukkan objektivitas dewan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
17.	Informasi tentang pendapat dewan tentang kepatuhan bank dengan aturan syariah Islam	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
18.	Dewan mengungkapkan pendapatnya setelah meninjau semua dokumen dan semua laporan keuangan untuk bank	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
19.	Informasi tentang tanggal laporan dan nama bank	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018

Sumber : Sherif *et al.*, 2018

Pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah) diukur dengan indeks pengungkapan dari laporan tahunan masing-masing perbankan setiap tahunnya. Dalam mengukur indeks pengungkapan dapat menggunakan metode

content analysis. Besarnya tingkat pengungkapan akuntabilitas dapat dihitung dengan membagi jumlah item yang diungkapkan dengan jumlah item maksimum.

$$\text{Disclosure level} = \frac{\text{Jumlah score disclosure yang dipenuhi}}{\text{jumlah item maksimum}}$$

2.2.2 Profitabilitas

Munawir, (2007) mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau profit dari pendapatan terkait kegiatan operasi perusahaan seperti penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Perusahaan yang berada pada posisi menguntungkan akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunnya.

Deegan (2002) menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi perusahaan telah membuat sebuah kontrak sosial tidak tertulis dengan masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi. Kegagalan perusahaan memperoleh legitimasi dari masyarakat akan mengancam kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang baik diharapkan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial lebih luas dari pada perusahaan yang profitabilitasnya kecil.

Dalam beberapa penelitian, terminologi profitabilitas bisa disebut dengan kinerja ekonomi (*economic performance*). Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara, antara lain ROA, ROE, laba per saham, deviden dalam suatu periode, margin keuntungan, tingkat pengembalian dan lain-lain.

Jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan pada perbankan antara lain (Marsuki, 2010) :

a) Profit Margin

Rasio ini menunjukkan kemampuan suatu entitas untuk memperoleh pendapatan dalam rangka menutup biaya operasinya sehingga mampu memberikan laba bagi entitas itu.

b) Return on Asset (ROA)

ROA adalah rasio yang dipergunakan untuk melihat tingkat efisiensi operasi bank secara keseluruhan, karena rasio ini membandingkan antara laba/surplus operasi dengan nilai aset.

c) Return on Equity (ROE)

ROE menunjukkan sejauh mana ekuitas telah dipergunakan untuk menghasilkan surplus atau meningkatkan pengembalian kepada pemegang saham (*shareholder*).

2.2.3 *Leverage*

Rasio *leverage* digunakan untuk menjelaskan penggunaan utang untuk membiayai sebagian daripada aktiva perusahaan (Muslich, 2003). Pembiayaan dengan utang mempunyai pengaruh bagi perusahaan karena utang mempunyai beban yang bersifat tetap. Kegagalan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang berakhir dengan kebangkrutan perusahaan. Tetapi penggunaan utang juga memberikan subsidi pajak atas bunga yang menguntungkan pemegang saham. Rasio *leverage* mengukur perbandingan

dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditor perusahaan tersebut.

Leverage memiliki beberapa kegunaan diantaranya (Brigham dan Weston, 1993) :

- a. Menghimpun dana melalui hutang, pemegang saham dapat mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas yang terbatas.
- b. Kreditor melihat ekuitas atau dana yang diberikan oleh pemilik sebagai batas pengaman. Jadi, makin tinggi proporsi total modal yang diberikan oleh pemegang saham, maka makin kecil risiko yang dihadapi kreditor.
- c. Jika hasil yang diperoleh dari aset perusahaan lebih tinggi daripada tingkat bunga yang dibayarkan, maka penggunaan utang akan “mengungkit” *leverage* atau memperbesar pengembalian atau ekuitas atau ROE.

Perusahaan dengan *leverage* yang rendah mempunyai risiko yang kecil bila perekonomian dalam keadaan menurun, tetapi perusahaan tersebut juga memiliki laba rata-rata yang rendah bila perekonomian naik. Sebaliknya, perusahaan dengan *leverage ratio* yang tinggi memiliki risiko menderita kerugian besar, tetapi juga mempunyai suatu kesempatan memperoleh keuntungan yang besar. Keputusan tentang menggunakan *leverage* berarti menyeimbangkan kemungkinan laba yang lebih tinggi dengan naiknya risiko (Brigham dan Weston, 1993). Ada 2 pendekatan untuk menghitung rasio *leverage*. Pendekatan pertama dengan menyelidiki rasio neraca dan menentukan besarnya dana yang dipinjam dan telah digunakan untuk pembiayaan perusahaan. Pendekatan lainnya, adalah mengukur risiko hutang (*risk*

of debt) dengan menggunakan rasio laporan keuangan laba/rugi, di mana diukur berapa kalikah biaya-biaya tetap dapat ditutup oleh laba operasi. Rasio *leverage* dapat diukur melalui cara-cara sebagai berikut (Brigham dan Weston, 1993);

- a. *Debt of Equity Ratio* (DER) adalah rasio total hutang terhadap total modal.
- b. *Debt of Asset Ratio* (DAR) adalah rasio total hutang terhadap total harta.
- c. *Times Interest Earned* (TIE) adalah perbandingan laba dengan biaya bunga ditentukan dengan membagi laba sebelum dikurangi bunga dan pajak (EBIT) dengan biaya bunga.

2.2.4 Ukuran Perusahaan (*Size*)

Prasetyorini (2013) dalam Hery, (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah bagi perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal (Hery, 2017).

Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik (*greater control*) terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi.

Selain itu, perusahaan besar mempunyai lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan nilai perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber pendanaan dari eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil Ernawati dan Widyawati (2015) dalam Hery (2017). Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset. Semakin besar aset maka semakin besar modal yang ditanam.

Bank Islam yang memiliki ukuran perusahaan besar harus bisa berkontribusi lebih banyak pada kegiatan masyarakat, disamping itu mematuhi prinsip syariah dalam semua kegiatan serta mengungkapkan informasi tentang kinerja keuangan mereka. Oleh karena itu. Ukuran Bank Islam yang besar dapat memberikan informasi tambahan dalam laporan tahunan untuk mengungkapkan akuntabilitas mereka kepada semua pemangku kepentingan, terutama kepada Allah dan investor muslim.

2.2.5 *Islamic Account Holder (IAH)*

Investment Account Holder (IAH) adalah struktur kepemilikan pada perbankan syariah yang sumbernya berasal dari dana nasabah. Archer *et al.*, (1998) menyatakan bahwa meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal dalam menentukan kebijakan perusahaan, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham. Nasabah dapat mempengaruhi pemegang saham dalam pengawasan terhadap manajemen karena keuntungan yang diperoleh pemegang saham ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana dari nasabah (Farook *et al.*, 2011).

Istilah *stakeholder* dalam perbankan syariah bukan hanya untuk pemegang saham saja, melainkan nasabah (*Investment Account Holder*), sehingga semakin tinggi *stakeholder* pada perbankan syariah, semakin tinggi pula tekanan bank dalam mengungkapkan informasi perusahaannya. *Investment Account Holder* atau nasabah dalam perbankan syariah dapat menentukan tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan informasi perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Selain itu, nasabah juga dapat menentukan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan berdampak pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penanam modal dalam perbankan syariah lebih memilih menginvestasikan dananya sebagai *Investment Account Holder* (IAH) daripada sebagai pemegang saham karena mereka lebih tertarik dengan layanan bank syariah daripada kepemilikan saham dari bank syariah tersebut (Farook *et al.*, 2011). Jika menjadi nasabah (*Investment Account Holder*) lebih menarik daripada menjadi pemegang saham dan sesuai dengan prinsip dan hukum syariah, maka pengaruh nasabah akan menentukan sejauh mana aktivitas bank sesuai dengan prinsip dan hukum syariah dan berdampak pada tingkat pengungkapan informasi yang dilaporkan oleh bank. Salah satu informasi yang diungkap oleh bank dalam laporan tahunannya adalah informasi tanggung jawab sosial, sehingga nasabah dapat mempengaruhi bank syariah dalam pengungkapan informasi tanggung jawab sosialnya.

Bank syariah memiliki struktur pendanaan yang unik dan berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah memiliki sumber pendanaan berupa dana syirkah temporer sebagai sumber pendanaan. Pengukuran *investment account*

holders dapat dihitung dengan membandingkan dana syirkah temporer dengan modal disetor penuh pemegang saham pada perbankan syariah.

2.2.6 Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah badan independen ahli hukum khusus dalam fiqh muamalah. DPS dapat mencakup anggota selain yang berspesialisasi dalam fiqh muamalah, tetapi ia harus menjadi ahli di bidang lembaga keuangan islam dan memiliki pengetahuan fiqh muamalah. DPS dipercayakan dengan tugas mengarahkan, meninjau, dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan islam untuk memastikan bahwa hal itu sesuai dengan aturan dan prinsip syariah islam. Fatwa dan peraturan dewan akan mengikat lembaga keuangan syariah.

Pendekatan umum yang digunakan lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kepentingan *stakeholders* terhadap kepatuhan syariah ialah membentuk DPS. DPS beranggotakan para ulama yang ahli syariah, yang bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perbankan syariah dan memastikan kesesuaiannya dengan aturan-aturan dan prinsip syariah.

Grais dan Pellegrini, (2006) menyatakan bahwa pada prinsipnya peran DPS meliputi lima bidang utama yaitu :

1. Memberikan izin kepada instrumen keuangan yang akan digunakan melalui fatwa (audit syariah *ex-ante*)
2. Memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan (audit syariah *ex-pot*)
3. Menghitung dan membayar zakat,
4. Menghilangkan pendapatan yang tidak memenuhi ketentuan syariah,

5. Memberi saran dan nasihat mengenai pembagian penghasilan dan pengeluaran antara pemegang saham dengan *investment account holders*.

Komponen penting *corporate governance* perbankan syariah adalah adanya DPS beserta kontrol internal yang mendukungnya (Abdullah, 2010). Menurut Lewis dan Algoud (dalam Abdullah, 2010), DPS penting karena dua alasan. Pertama, mereka yang berurusan dengan bank syariah memerlukan jaminan bahwa bank itu beroperasi sesuai dengan syariah. Seandainya DPS melaporkan bahwa manajemen bank melanggar prinsip syariah, bank itu akan kehilangan kepercayaan dari mayoritas investor dan nasabahnya. Kedua, sebagian besar ulama berpendapat bahwa prinsip-prinsip islam yang tegas akan meminimumkan masalah insentif. Kaum muslim meyakini adanya akhirat beserta pahala dan siksaan, mereka yang jujur akan diganjar kebaikan dan yang dusta akan disiksa. Solidaritas muslim merupakan basis tatanan sosial, yang terbangun di atas keyakinan bahwa aturan moral islam akan mencegah berkembangnya perilaku yang tidak etis.

2.2.7 Dewan Komisaris

Dewan komisaris menurut Khairandy dan Malik (2007) merupakan organ perseroan yang bertugas untuk mengawasi kebijakan yang dibuat oleh direksi dan juga mengawasi urusan perseroan secara umum. Komisaris juga membantu direksi dengan memberikan saran atau nasihat pada direksi dalam mengelola perseroan. Fungsi pengawasan komisaris termasuk juga didalamnya kewenangan dan tugas untuk melakukan intervensi dalam pengelolaan perseroan ketika dipandang perlu dan mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang dibutuhkan demi kepentingan sesuai dengan aturan yang ada dalam anggaran dasar dan undang-undang, serta

mengawasi pembukuan perseroan dan memiliki akses yang tidak terbatas dalam perseroan.

Dewan komisaris memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh organ perseroan yang lain. Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut (Khairandy dan Malik (2007; 27):

- a) Mempunyai kewenangan untuk mengangkat , menanggihkan, dan memberhentikan direksi.
- b) Mempunyai kewenangan untuk menyetujui laporan keuangan tahunan perseroan.
- c) Kewenangan untuk menyetujui ataupun menolak tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh direksi.

Jumlah dewan komisaris dalam perseroan terbatas minimal 2 (dua) anggota sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 105 yang menjelaskan bahwa :

“Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota dewan komisaris, dimana setiap perusahaan yang berbeda jumlahnya karena disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Agar fungsi pengawasan dewan komisaris dapat terlaksana dengan baik, maka dewan komisaris harus mengadakan rapat dengan direksi secara rutin setidaknya empat sampai sepuluh kali dalam satu tahun”.

Apabila dikaitkan dengan teori *stakeholder* ukuran dewan komisaris yang semakin besar akan memudahkan perusahaan dalam mengawasi dan memonitoring tindakan yang dilakukan manajemen secara efektif. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin banyak dewan komisaris dalam suatu perusahaan, menjadikan

pengawasan akan berjalan dengan baik dan pengungkapan tanggung jawab bank semakin luas.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah pada perbankan syariah secara ringkas disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Hesham Albarak, Sherif El-Halaby (2019)	AAOIFI Governance Standards: Sharia Disclosure And Financial Performance For Islamic Banks	Variabel Dependen : - Tingkat pengungkapan Variabel Independen : - Kinerja keuangan - Jenis standard Variabel Control : - Jenis Auditor - Umur perusahaan - Ukuran Perusahaan - Leverage - Keberadaan divisi audit syariah - Kepemilikan - Dimensi budaya hofstede - Sistem hukum negara - Adopsi penuh AAOFI - Indeks korupsi	- Tingkat pengungkapan rata-rata 53 % dari sample 120 negara - Jenis standard : Negara yang mengadopsi AAOIFI memiliki tingkat kepatuhan syariah yang tinggi dari negara yang mengadopsi IFRS. - Kinerja keuangan (ROA) berpengaruh positif

No	Peneliti	Judul	Variabel	- Hasil
2.	Hendri Affandi dan Meta Nursita (2019)	Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan: Sebuah Analisis Islamic Social Reporting (ISR) pada perusahaan yang terdaftar di JII	Variabel dependen: <i>Islamic Social Reporting</i> Variabel Independen : - Profitabilitas - Likuiditas - Leverage - Ukuran perusahaan	- Profitabilitas berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting - Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Islamic Social Reporting - Leverage tidak berpengaruh terhadap ISR - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ISR
3.	Andi Nuraeni dan Rini (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>	Variabel dependen : - <i>Islamic Social Reporting</i> Variabel independen : - Likuiditas - Ukuran Perusahaan - Umur Perusahaan - <i>Islamic Governance Score</i>	- Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR - Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR - Umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR - <i>Islamic Governance Score</i> berpengaruh terhadap pengungkapan ISR
4.	El-Halaby, S., Hussainey, K., Marie, M., & Mohsen, H. (2018)	The Determinants Of Financial, Social And Sharia Disclosure Accountability For Islamic Banks	Variabel dependen : - Kepatuhan/pengungkapan (Syariah, Sosial, Keuangan) Variabel Independen : - Standar AAOIFI - Akuntan/Auditor external - Ukuran - Profitabilitas - Leverage	Tingkat pengungkapan - keuangan 62% - syariah 52 % - sosial 28% pengungkapan holistik yang - syariah 40 % - sosial 28 % - keuangan 81 % - standar AAOIFI berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> - Departemen Audit Syariah (SAD) - Kepemilikan Variabel Kontrol : - Risiko Kecukupan - Kepemilikan - Usia - Budaya - Adopsi penuh AAOIFI - Peran Bank Sentral - Islamisasi sistem - PDB - Indeks Korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> - ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan - departemen audit syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan - Auditor external tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan - Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan - leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan - kepemilikan memiliki pengaruh yang positif & negatif
5.	Yusoff (2018)	Effects of Financial Performance and Governance on Corporate Social Responsibility Disclosure : Evidence from Islamic Financial Institutions in Malaysia	Variabel Dependen : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas - Dewan pengawas syariah - Investment Account Holders Variabel kontrol : <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas tidak berpengaruh - Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif sebesar 13,5% - <i>Investment Account Holder</i> berpengaruh positif sebesar 9%

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
6.	Kasih A,M (2018)	Factors Influencing Islamic Social Reporting Disclosure in Some Selected Countries. <i>International Conference on Islamic Finance, Economics and Business</i>	Variabel Dependen : - <i>Islamic Social Responsibility Disclosure</i> Variabel Independen : - <i>Muslim Population</i> - <i>Islamic Governance Score</i> - <i>Leverage</i> - <i>Profitability</i>	- <i>Muslim Population</i> tidak berpengaruh <i>Islamic Governance Score</i> berpengaruh signifikan - 39,67% - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh - Profitabilitas tidak berpengaruh
7.	Hasan Mukhibad (2018)	Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting	Variabel Independen : - Dewan Pengawas Syariah - Ukuran Perusahaan - Ukuran Dewan Komisaris - Leverage - Umur Perusahaan Variabel Dependen <i>Islamic Social Responsibility Disclosure</i>	- Dewan pengawas syariah berpengaruh positif sebesar 25 % - Ukuran perusahaan berpengaruh positif sebesar 49% - Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif sebesar 13% - Leverage berpengaruh positif sebesar 22 % - Umur perusahaan tidak berpengaruh
8.	Kurniawati & Yaya (2017)	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan ISR	Variabel dependen : - <i>Islamic Social Reporting Disclosure</i> Variabel independen : - Dewan komisaris - Komite audit	- Dewan Komisaris berpengaruh positif sebesar 18% - Komite audit tidak berpengaruh - Dewan komisaris independen tidak berpengaruh - Profitabilitas berpengaruh positif sebesar 28,6%

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			<ul style="list-style-type: none"> - Dewan komisaris independen - Profitabilitas - Kinerja lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja lingkungan berpengaruh positif sebesar 2,9%
9.	Sherif El-Halaby dan Khaled Hussainey (2016)	Determinants of compliance with AAOIFI standards by Islamic banks	<p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> kepatuhan/pengungkapan (syariah, sosial, keuangan) <p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit external - Umur bank - Ukuran bank - Profitabilitas - Departemen Audit Syariah(SAD) - Jumlah blockholders - Kepemilikan Institutional - Kepemilikan asing - Duality - Dewan direksi - Ukuran dewan pengawas syariah - Dewan pengawas syariah lintas keanggotaan - Reputasi dewan pengawas syariah - Budaya 	<p>Tingkat pengungkapan terhadap AAOIFI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Syariah 68% - Sosial 27% - Keuangan 73 % <ul style="list-style-type: none"> - Umur Bank berpengaruh positif signifikan pada pengungkapan - ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan pada pengungkapan - departemen audit syariah berpengaruh positif signifikan pada pengungkapan - ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan pada pengungkapan - Auditor external - Tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan - Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan - Jumlah blockholders tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan - Kepemilikan institutional tidak berpengaruh

No	Judul	Peneliti	Variabel	Hasil
				<p>signifikan terhadap pengungkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan asing, duality tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan - Dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Dewan pengawas syariah lintas keanggotaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan - Reputasi dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan
10.	Aviciena Zanjabil dan Adityawarman (2015)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Variabel Dependen: - <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Independen: - <i>Islamic Governance Score</i> - <i>Islamic Account Holder</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Islamic Governace Score</i> berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR - <i>Islamic Account Holder</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR
11.	Juhmani, (2014)	Determinants of Corporate Social and Environmental Disclosure on Website:the Case of Bahrain	Variabel dependen : - <i>Corporate social and environmental disclosure</i> -	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh - Profitabilitas tidak berpengaruh - <i>Leverage</i> berpengaruh positif sebesar 37,5% -

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			Variabel independen: - Ukuran perusahaan - Profitabilitas - Leverage - Umur perusahaan - Ukuran audit	- Umur perusahaan tidak berpengaruh - Ukuran audit perusahaan berpengaruh positif
12.	Sayd Farook, M. Kabir Hassan, Roman Lanis (2011)	Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks	Variabel Dependen : - <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Variabel Independen : - <i>Political rights and civil liberties</i> - <i>Proportion of muslim population</i> - <i>Islamic Governance Score</i> - <i>Investment account holders</i>	- <i>Political rights and civil liberties</i> berpengaruh negatif sebesar 7,2% - <i>Proportion of muslim population</i> berpengaruh positif sebesar 48,1% - <i>IG Score</i> berpengaruh positif sebesar 3,5% - <i>IAH</i> berpengaruh positif sebesar 9,6%
13.	A.A. Ousama A.H.Fatima (2010)	Voluntary disclosure by Shariah approved companies: an exploratory study	Variabel dependen: - Perusahaan syariah yg terdft di bursa malaysia Variabel independen : - Indeks skor pengungkapan sukarela (keseluruhan, konvensional, pengungkapan islam)	- pengungkapan keseluruhan 19% - pengungkapan konvensional 21% - pengungkapan islam 17%

2.4 Kerangka Berfikir dan Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas

Profitabilitas merupakan suatu rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan laba yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dikelola dengan baik oleh manajemen perusahaan. Perusahaan yang berada pada posisi yang menguntungkan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Pengungkapan informasi tersebut bertujuan untuk mengurangi biaya sosial dan menunjukkan kinerja keuangan kepada publik.

Sesuai dengan perspektif Islam teori *syariah enterprise theory* menyatakan bahwa pengungkapan akuntabilitas penuh yaitu kepada Allah sebelum pemangku kepentingan. Manajer sebagai agen yang menjalankan operasional perusahaan harus memperhatikan prinsip halal dan haram dalam memperoleh laba sebagai tanggung jawab nya kepada Allah SWT, kemudian sumber pendapatan tersebut dilaporkan dalam laporan tahunan sebagai pertanggungjawabannya kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu perusahaan harus menyediakan pengungkapan penuh dalam situasi apapun apakah itu dalam keadaan menguntungkan maupun sebaliknya.

Berdasarkan teori sinyal, perusahaan dapat mengirimkan sinyal kepada investor melalui pengungkapan informasi yang dimiliki perusahaan guna mengurangi ketidakpastian akan prospek perusahaan dimasa depan dan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Prospek suatu perusahaan dapat diamati dari tingkat profitabilitasnya, profitabilitas yang tinggi mnggambarkan prospek

perusahaan yang baik dan begitupun sebaliknya. Pengungkapan informasi keuangan terkait peningkatan profitabilitas atau laba dalam laporan keuangan akan meningkatkan prospek perusahaan dimasa depan sehingga hal ini akan dianggap sebagai sinyal positif oleh investor. Investor akan merespon sinyal positif tersebut melalui peningkatan permintaan saham yang akan berdampak pada meningkatnya harga saham dan nilai perusahaan.

Penelitian Kurniawati dan Yaya (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profit yang tinggi akan menarik para investor dengan upaya memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat serta *stakeholder* lainnya dengan meningkatkan pengungkapan akuntabilitas sosial. Hasil tersebut didukung oleh penelitian selanjutnya dari (Pratama, 2018; Yusoff, 2018; Sherif *et al.*, 2018; Affandi dan Nursita, 2019).

2.4.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas

Leverage merupakan rasio yang menjelaskan penggunaan utang untuk membiayai sebagian aktiva perusahaan. Rasio *leverage* mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditor perusahaan. Pembiayaan melalui hutang memiliki pengaruh kepada perusahaan karena utang mempunyai beban yang bersifat tetap. Apabila rasio leverage tinggi memiliki arti bahwa pendanaan dengan utang semakin banyak, sehingga semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dkhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula sebaliknya, apabila rasio leverage rendah maka semakin kecil

perusahaan dibiayai dengan utang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Umiyati dan Baiquni, 2018).

Syariah Enterprise Theory dan *Stakeholder Theory* mengimplikasikan bahwa perusahaan dalam beroperasi tidak hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan harus memberikan kebermanfaatan kepada stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, karyawan, kreditor, debitor, pemegang saham, dan lain-lain serta memiliki tanggung jawab yang utama kepada Allah. Perusahaan harus mampu menjelaskan kepada kreditor, investor maupun pihak berkepentingan lainnya mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dan dampak yang ditimbulkan dari pinjaman tersebut terhadap kegiatan perusahaan. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian Juhmani (2014) yang menyatakan bahwa semakin tinggi *leverage*, maka semakin banyak perusahaan kemungkinan akan mengungkapkan informasi akuntabilitasnya. Pengungkapan dapat mengurangi asimetri informasi dan ketidakpastian mengenai prospek perusahaan dimasa mendatang serta memberikan keyakinan kepada *stakeholder* bahwa perusahaan tidak melanggar perjanjian yang ada. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Mukhibad (2018) dan Pratama (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas sosial.

Tingkat *leverage* yang tinggi akan mendorong perusahaan meningkatkan pengungkapan lebih banyak informasi untuk memenuhi harapan. Sehingga semakin tinggi *leverage*, maka pengungkapan akuntabilitas pada perbankan syariah juga semakin luas.

2.4.3 Pengaruh *Investment Account Holder* Terhadap Pengungkapan

Akuntabilitas

Investment account holders (IAH) merupakan struktur kepemilikan pada perbankan syariah yang dana nya bersumber dari nasabah. Nasabah atau IAH tidak memiliki hak untuk ikut dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan atau perbankan syariah. Namun, pemegang saham menjadi perwakilan bagi IAH untuk melakukan kontrol bagi perusahaan terhadap stakeholder.

Teori *stakeholder* merupakan teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan stakeholder baik dari internal maupun eksternal dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada untuk mencapai tujuan yang mendatangkan kebermanfaatn bersama (Lindawati dan Puspita, 2015). *Investment Account Holder* (IAH) yang merupakan nasabah bisa saja dari internal perbankan maupun eksternal perbankan, karena setiap karyawan dalam perbankan memiliki kewajiban untuk membuka rekening serta memiliki dana di rekening tersebut artinya karyawan merupakan stakeholder yang membantu perusahaan dalam penghimpunan dana di bank dalam bentuk tabungan.

IAH merupakan *stakeholder* yang lebih mengutamakan pada aspek penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. IAH lebih tertarik pada produk-produk perbankan syariah yang memberikan benefit pada setiap produknya dan akan memperhatikan setiap produk tersebut dengan ketentuan Islam untuk menjauhi riba. Pengaruh IAH akan menentukan sejauh mana aktivitas

bank sesuai dengan prinsip dan hukum syariah sehingga berdampak pada tingkat pengungkapan informasi yang dilaporkan oleh bank syariah.

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Farook, *et.al*,(2011) dan Yusoff (2018) yang membuktikan bahwa IAH berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah. Semakin besar tingkat pemantauan oleh IAH, maka semakin luas pula pengungkapan tanggung jawab oleh perbankan syariah.

2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah bagi perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Berdasarkan prinsip syariah, bank syariah yang memiliki ukuran lebih besar harus bisa berkontribusi lebih banyak untuk kegiatan masyarakat serta mematuhi prinsip syariah dalam semua kegiatan operasional perbankan dan mengungkapkan informasi tentang kinerja keuangannya. Pengungkapan informasi tentang kinerja keuangan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan informasi tambahan pada laporan tahunannya untuk mengungkapkan akuntabilitas mereka yang berguna bagi semua kelompok kepentingan.

Berdasarkan penerapan *Syariah Enterprise Theory* bahwa perkembangan sebuah perusahaan yang menjadi besar maka perlu menunjukkan akuntabilitasnya secara lebih luas tidak terbatas hanya untuk perusahaan sendiri, melainkan juga kepada Allah sebagai stakeholder yang pertama dimana bank syariah beroperasi menurut prinsip syariah yang merupakan aturan Allah dan menjadi pedoman

manusia dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Akuntabilitas yang selanjutnya adalah kepada *stakeholders* yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Akuntabilitas dari perbankan syariah menjadi salah satu bagian terpenting dari kegiatan operasional perbankan sebagai tanggung jawabnya kepada *stakeholder*. Pengungkapan akuntabilitas bank syariah diharapkan bisa memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan *stakeholder*.

Ukuran perusahaan berhubungan dengan teori agensi dimana teori agensi dilakukann dengan tujuan menghindari terjadinya konflik yang terjadi antara agen dan *principal*. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi seluruh item perusahaan, antara lain jumlah pegawai, jumlah produksi, pendapatan perusahaan dan sebagainya. Stakeholder diharapkan mendapatkan informasi yang lengkap , dan untuk mendapatkan informasi lengkap tersebut tidak terlepas dari hubungan teori keagenan, yang dimana teori keagenan tersebut berisikan perjanjian antara agen kepada *principal* untuk selalu memberikan semua informasi mengenai keadaan perusahaan tanpa adanya permainan dari manajer.

Ukuran bank Islam yang besar membuat manajemen harus mengungkapkan akuntabilitasnya lebih luas, baik akuntabilitas keuangan, sosial maupun syariah. Semakin besar ukuran perbankan maka semakin besar pula tanggung jawabnya dalam menerima amanah yang diberikan oleh stakeholder dalam pengelolaan perbankan, karena ukuran bank yang semakin besar kemungkinan akan diikuti dengan risiko penyalahgunaan yang besar pula, untuk itu transparansi diperlukan untuk memenuhi kepentingan stakeholder.

Penelitian El-Halaby dan Hussainey, (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan akuntabilitas keuangan bank syariah. Penelitian tersebut didukung oleh (Sherif *et al.*, 2018; Nuraeni dan Rini, 2019) yang menyatakan hal serupa bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi financial, social and sharia disclosure accountability perusahaan.

2.4.5 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas

Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan istilah yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal dalam perbankan syariah. Di luar negeri, DPS disebut dengan *Sharia Supervisy Board* (SSB) atau *Sharia Committee*, atau *Sharia Council* dan sebagainya. Peran DPS dalam struktur organisasi perbankan syariah setara dengan dewan komisaris. Di Indonesia DPS bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bank Indonesia. DPS memiliki peranan untuk memberikan pengawasan terhadap perbankan syariah terkait dengan kepatuhan syariah. Selain itu menurut Indrawaty dan Wardayati (2016) DPS memiliki kewenangan untuk memberikan masukan dan peringatan terhadap pihak manajemen tentang pengelolaan maupun kebijakan terkait dengan prinsip syariah. Menurut N. Hartono (2018) , DPS harus mampu menjalankan fungsinya dalam mengawasi kepatuhan syariah, karena sebaik apapun kinerja keuangan bank syariah namun melanggar prinsip syariah, maka tidak bernilai apa-apa dalam perspektif Islam.

Islamic Financial Service Board (IFSB) tentang Pedoman Dasar-Dasar Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Lembaga Keuangan Islami pada Appendix 4 tentang kompetensi minimal yang dimiliki oleh DPS menyebutkan :

“He or she must at least hold a bachelor’s degree/ijazah from a recognized university in the sciences of Shari’ah, including Islamic transaction/commercial law (Fiqh al-Muamalat), and be able to demonstrate an adequate understanding of finance in general and Islamic finance in particular”.

Hal ini menunjukkan bahwa DPS harus berpendidikan minimal sarjana atau S1. Pada dasarnya ilmu yang diperoleh pada tingkat pendidikan S1 adalah ilmu-ilmu dasar yang masih dapat dikembangkan saat menempuh pendidikan magister atau doktor, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan DPS akan membuat pengetahuan DPS semakin komprehensif.

Tugas pokok dan fokus utama DPS adalah dalam hal kepatuhan syariah, maka sudah seharusnya ilmu dan kompetensi yang dimiliki DPS juga semakin tinggi. Menurut Farook, Hasan dan Lanis (2011) Menyatakan bahwa DPS juga memiliki tugas mengaudit, sehingga tingkat pendidikan auditor dalam hal ini DPS akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan, keterampilan dan keahlian DPS sehingga akan berdampak pada efektivitas DPS dalam melakukan tugasnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat pendidikan formal DPS, maka DPS akan memperoleh ilmu yang lebih komprehensif dibanding jika ia berpendidikan rendah.

Menurut Farook *et al.*, (2011), Biasanya anggota DPS terdiri dari ahli hukum Islam yang mungkin tidak berpendidikan tinggi dalam studi sekuler. Hal ini Tentunya dapat menghambat kemampuan DPS dalam menerapkan hukum-

hukum maupun prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh dikarenakan kurangnya pengetahuan komersil praktis. berdasarkan hal tersebut maka DPS yang berpendidikan tinggi sangat diharapkan mampu menerapkan ilmu-ilmu nya untuk mengawasi kepatuhan syariah Bank Umum Syariah di Indonesia.

Dilandasi oleh *Shariah Enterprise Theory* (SET) dan teori *stakeholders* maka diyakini bahwa dengan keyakinan dan penuh tanggung jawab kepada Allah dan seluruh *stakeholders* DPS akan melakukan tugasnya dengan baik sehingga akan tercapai tujuan perusahaan sesuai prinsip syariah serta dapat meningkatkan pengungkapan akuntabilitas dari bank syariah. Kompetensi dan keahlian DPS yang dilihat dari tingkat pendidikan DPS maka DPS akan lebih bisa memahami konsep syariah secara komprehensif sehingga dapat bertanggungjawab dalam menjaga kepercayaan yang diberikan *stakeholders*. Bentuk pertanggungjawaban DPS kepada *stakeholders*. ditunjukkan dengan pengawasan kinerja perbankan dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah secara maksimal.

Penelitian Farook *et al.*, (2011) menemukan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah dan karakteristiknya telah meningkatkan tingkat pengungkapan pada bank Islam. Penelitian tersebut didukung oleh (Nuraeni dan Rini, 2019; Yusoff, 2018) yang menyatakan bahwa DPS berpengaruh pada pengungkapan akuntabilitas bank Islam.

2.4.6 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas

Dewan komisaris sebagai puncak pengelolaan internal perusahaan memiliki peran terhadap aktivitas perusahaan. Dewan komisaris merupakan bagian dari perusahaan yang bertugas mengawasi dan memberikan saran kepada direksi dalam

mengelola perusahaan agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan *shareholder* dan *stakeholders*. Fungsi dewan komisaris meliputi fungsi pengawasan dan fungsi penasihat. Fungsi pengawasan dewan komisaris berperan penting dalam membantu perusahaan untuk mencapai keberhasilan salah satunya GCG dan tanggung jawab sosial perusahaan. Fungsi penasihat yaitu memberikan nasihat kepada direksi dalam pembuatan agenda dan pelaksanaan program. Semakin banyak dewan komisaris dalam suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dalam mengelola perusahaan, dengan adanya pengawasan yang baik dari dewan komisaris diharapkan pengungkapan akuntabilitas semakin luas.

Berdasarkan penerapan *Syariah Enterprise Theori* dan *Stakeholders Theory*, dewan komisaris perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil manajemen dalam peningkatan laba dan CSR nya sesuai dengan nilai-nilai syariah dimana setiap kegiatan operasional perbankan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah sebagai *stakeholders* yang lainnya. Dewan komisaris sebagai pengawas dari kegiatan direksi dalam menjalankan perusahaannya diharapkan mampu membantu *stakeholders* untuk mengetahui sejauh mana pengungkapan akuntabilitas suatu perbankan syariah, baik akuntabilitas keuangannya, sosial, dan syariah. Peran dewan komisaris inilah yang akan membantu pemegang saham dalam menilai kinerja perbankan syariah untuk menginvestasikan dananya.

Selain itu dewan komisaris sebagai pengawas dan memberi saran terhadap direksi sangat dianjurkan memiliki pengetahuan yang lebih banyak di bidang perbankan dan ilmu agama. Minimal pendidikan terakhir D3 dan memiliki gelar

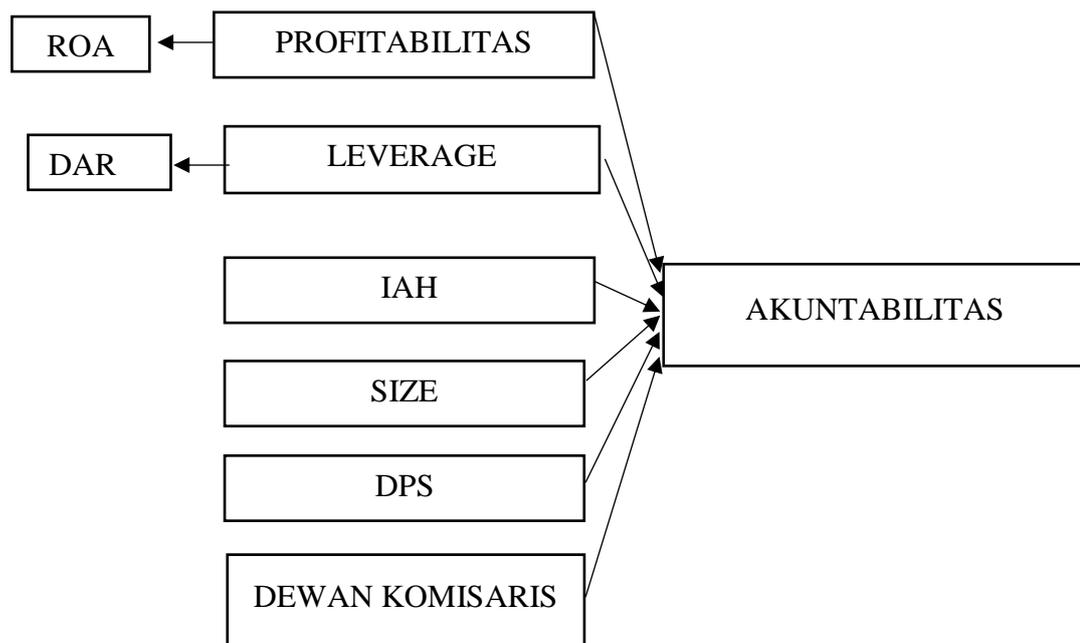
setidaknya dibidang ekonomi, karena standar kelulusan dari perguruan tinggi mengindikasikan pengetahuan dan kemampuan seseorang yang menjadi dewan komisaris pada perusahaan. Dewan komisaris yang memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai perekonomian dan agama Allah, akan sangat membantu dalam tugasnya dalam memberi nasihat kepada direksi dan manajemen supaya kegiatan operasional nya sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian Indrawaty dan Wardayati (2016) mengatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas bank syariah. Penelitian tersebut didukung oleh Kurniawati dan Yaya (2017) yang menyatakan hal serupa.

2.4 Hipotesis Penelitian

Kerangka berfikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir diatas, penulis merumuskan enam hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1. Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan akuntabilitas.
- H2. *Leverage* perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan akuntabilitas.
- H3. *Islamic Account Holder* perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan akuntabilitas.
- H4. *Size* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan akuntabilitas.
- H5. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan pengungkapan akuntabilitas.
- H6. Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan pengungkapan akuntabilitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan desain yang digunakan adalah *hypothesis testing study* yang bertujuan untuk menganalisis, mendiskripsikan, dan mendapatkan bukti empiris pola hubungan antara dua variabel atau lebih, baik yang bersifat kausalitas (Wahyudin, 2015). Penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antar variabel.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan bank umum syariah yang dipublikasi secara resmi dari *website* resmi masing-masing bank syariah selama periode tahun 2011 - 2018. Penelitian ini menggunakan *content analysis* dalam menilai *financial, social and sharia disclosure accountability* dengan unit analisis laporan tahunan perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan alat analisis *E-Views 09*.

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode tahun 2011 - 2018 yang berjumlah 14 emiten. Penentuan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive*

sampling yaitu metode yang mempunyai tujuan berkaitan dengan karakteristik data yang dibutuhkan. Berikut merupakan kriteria yang ditentukan untuk pengambilan sampel, antara lain:

1. Bank Umum Syariah yang tercatat di Bank Indonesia tahun 2011 - 2018.
2. Bank Umum Syariah yang tidak menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut dari tahun 2011 - 2018.

Prosedur dalam menentukan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rangkuman Hasil Proses Pengambilan Sample

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Bank Umum Syariah yang tercatat di Bank Indonesia tahun 2011 - 2018.	14
2.	Bank Umum Syariah yang tidak menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut dari tahun 2011 - 2018.	(6)
	Jumlah	8
	Jumlah sampel penelitian (8X8 tahun)	64

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan tersebut dari 14 bank umum syariah hanya 8 bank umum syariah yang memenuhi kriteria sebagai sample dalam penelitian ini dengan unit analisis sebanyak 64. Berikut merupakan daftar bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 3.2
Data Sampel Penelitian

No	Nama Bank
1.	PT Bank Muamalat Indonesia
2.	PT Bank BRI Syariah
3.	PT Bank BNI Syariah
4.	PT Bank Syariah Mandiri
5.	PT Bank Mega Syariah
6.	PT Bank Panin Dubai Syariah
7.	PT Bank Syariah Bukopin
8.	PT BCA Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, data sekunder diolah 2020

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen (variabel endogen), dan variabel independen (variabel eksogen). Variabel dependen (variabel endogen) dalam penelitian ini adalah pengungkapan akuntabilitas sedangkan variabel independen (variabel eksogen) meliputi profitabilitas (X1), *leverage* (X2), *islamic account holder* (X3), *size* (X4) DPS (X5), dewan komisaris (X6). Masing-masing variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut :

3.3.1 Pengungkapan Akuntabilitas

Pengungkapan memiliki arti bahwasanya informasi diungkapkan dengan jelas, akurat, lengkap, dapat dipercaya dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya pada suatu perusahaan. Pengungkapan terdiri dari *full disclosure*, *adequate disclosure*, *fair disclosure*, pengungkapan wajib, dan pengungkapan sukarela (Harahap, 2007).

Pengungkapan akuntabilitas pada bank Islam menurut Sherif *et al.*, (2018) memiliki tiga pilar komprehensif akuntabilitas yang perlu diungkapkan pada

laporan keuangan. Tiga pilar komprehensif pengungkapan akuntabilitas tersebut meliputi *financial accountability, social accountability and sharia accountability*.

Financial accountability berarti sejauh mana laporan keuangan dapat mencerminkan informasi kinerja keuangan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. Pengungkapan akuntabilitas keuangan sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan dikarenakan pengungkapan tersebut memberikan informasi untuk mengurangi ketidakpastian dan mendukung mereka untuk membuat keputusan yang terbaik (Sherif *et al.*, 2018).

Social Accountability tercermin dari sejauh mana bank melayani masyarakat serta membayar zakat dan qard hasan berdasarkan laporan CSR dan pernyataan sosial di seluruh bagian laporan tahunan. Konsep akuntabilitas sosial dalam Islam telah mengakibatkan konsep pengungkapan penuh, dimana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui tentang efek dari kegiatan dan operasional perusahaan (Baydoun dan Willet, 1997; Maali *et.al* 2006).

Sharia Accountability untuk bank syariah didukung dan disetujui melalui Dewan Pengawas Syariah (Albarak dan Sherif, 2019). Pengungkapan akuntabilitas syariah merupakan tingkat pengungkapan mengenai kepatuhan syariah melalui laporan Dewan Pengawas Syariah serta indikator kepatuhan syariah pada seluruh bagian laporan tahunan.

Berikut indikator *financial, sosial and sharia disclosure accountability* yang dikemukakan oleh Sherif *et al.*, (2018) :

Tabel 3.3***Financial Disclosure Index***

No	Item yang diungkapkan	Sumber data	Referensi
1.	Laporan keuangan komparatif	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
2.	Informasi dasar tentang bank	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
3.	Pengungkapan mata uang yang digunakan untuk pengukuran akuntansi	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
4.	Pengungkapan kebijakan akuntansi yang signifikan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
5.	Pengungkapan penghasilan atau pengeluaran yang dilarang syariah	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
6.	Pengungkapan tentang aset dan kewajiban risk	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
7.	Pengungkapan contingences	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
8.	Pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
9.	Penyajian dan pengungkapan posisi keuangan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
10.	Penyajian dan pengungkapan laporan laba rugi	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
11.	Pengungkapan laporan arus kas	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
12.	Laporan perubahan ekuitas pemilik	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
13.	Laporan perubahan dana investasi terikat	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
14.	Pengungkapan dalam pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat dan sedekah	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018
15.	Pengungkapan dalam pernyataan sumber dan penggunaan dana, dana pinjaman (Qard Hasan Fund)	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> ,2018

Tabel 3.4***Social Disclosure Index***

No	Item yang diungkapkan	Sumber data	Referensi
1.	Kesejahteraan karyawan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
2.	Kebijakan pelestarian lingkungan internal	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
3.	Layanan pelanggan par excellance	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
4.	Pembayaran yang terlambat dan klien yang bangkrut dan menghindari persyaratan yang memberatkan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
5.	Qard hasan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
6.	Usaha mikro dan kecil dan tabungan sosial dan investasi dan pembangunan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
7.	Menyaring dan memberi tahu klien untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
8.	Zakat	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
9.	Aktivasi amal	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
10.	Manajemen wakaf	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
11.	Tanggung jawab sosial	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018

Tabel 3.5***Sharia Disclosure Index***

No	Item yang diungkapkan	Sumber data	Referensi
1.	Nama anggota dewan syariah	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
2.	Penjelasan singkat tentang setiap anggota di dewan syariah (latar belakang dan kualifikasi)	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
3.	Jumlah anggota dewan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
4.	Gambar anggota dewan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
5.	Posisi administrasi dewan syariah dalam struktur organisasi	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
6.	Peran dan tanggung jawab dewan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
7.	Otoritas dewan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018

No	Item yang diungkapkan	Sumber data	Referensi
8.	Departemen audit syariah bank	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
9.	Rekening pertemuan dewan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
10.	Situs web atau laporan tahunan yang mengungkapkan Fatwa untuk dewan Syariah terkait dengan layanan Islam	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
11.	Apakah website mengungkapkan peran dewan untuk menyebarkan kesadaran tentang pemikiran perbankan Islam	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
12.	Laporan DPS ditugaskan dari anggota dewan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
13.	Informasi tentang tanggung jawab bank atas zakat	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
14.	Informasi tentang tanggung jawab bank atas kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah dan bagaimana bank menghadapinya	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
15.	Informasi tentang bagaimana proses distribusi laba di bank mematuhi prinsip syariah	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
16.	Informasi tentang independensi dewan DPS dengan bagan yang menunjukkan objektivitas dewan	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
17.	Informasi tentang pendapat dewan tentang kepatuhan bank dengan aturan syariah Islam	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
18.	Dewan mengungkapkan pendapatnya setelah meninjau semua dokumen dan semua laporan keuangan untuk bank	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018
19.	Informasi tentang tanggal laporan dan nama bank	Laporan Tahunan	Sherif <i>et al.</i> , 2018

Financial, social and sharia disclosure accountability dihitung menggunakan indeks pengungkapan yaitu *financial disclosure index, social disclosure index, sharia disclosure index* dan diberi nilai (*score*) 1 untuk kategori pengungkapan yang memenuhi kriteria serta diberi nilai (*score*) 0 jika tidak termasuk dalam kriteria pengungkapan. Tingkat pengungkapan (%) diukur untuk masing –masing bank sebagai rasio dari nilai yang diperoleh (Sherif *et al.*, 2018).

$$disclosure\ level = \frac{jumlah\ score\ disclosure\ yang\ dipenuhi}{jumlah\ item\ maksimum}$$

3.3.2 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Munawir, 2007). Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan *return on asset (ROA)*. *Return on Asset (ROA)* merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan total aktiva. ROA dapat dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Peneliti memilih pengukuran ROA dalam mengukur profitabilitas karena ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk diproyeksikan di masa yang akan datang. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan.

$$ROA = \frac{Laba\ bersih\ setelah\ pajak}{Total\ Aktiva} \times 100\%$$

3.3.3 Leverage

Rasio *leverage* digunakan untuk menjelaskan penggunaan utang untuk membiayai sebagian daripada aktiva perusahaan (Muslich, 2003). Dalam penelitian ini, *leverage* diukur dengan menggunakan dua pengukuran, yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR). *Debt to Asset Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi DAR mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah aset yang dibiayai oleh hutang dan semakin kecil jumlah aset yang dibiayai oleh modal.

$$DAR = \frac{\text{Total Utang (debt)}}{\text{Total Aset (total asset)}} \times 100\%$$

3.3.4 Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik (*greater control*) terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi.

Variabel ukuran bank diukur dengan menggunakan jumlah aset perusahaan.

$$\text{Ukuran Bank} = \ln \text{Total Asset}$$

3.3.5 *Investment Account Holder*

Investment Account Holder (IAH) adalah struktur kepemilikan pada perbankan yang bersumber dari dana nasabah (Farook, *et.al*, 2011) . Penelitian ini memproksikannya dengan dana syirkah temporer dibagi jumlah modal disetor untuk melihat besarnya *Investment Account Holder (IAH)* pada perbankan syariah. Pengukuran *Investment account holder* dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$IAH = \frac{\text{Total Dana Syirkah Temporer}}{\text{Modal disetor Penuh Pemegang Saham}}$$

3.3.6 **Dewan Pengawas Syariah**

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah badan independen ahli hukum khusus dalam fiqh muamalah. DPS dapat mencakup anggota selain yang berspesialisasi dalam fiqh muamalah, tetapi ia harus menjadi ahli di bidang lembaga keuangan islam dan memiliki pengetahuan fiqh muamalah. DPS dipercayakan dengan tugas mengarahkan, meninjau, dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan islam untuk memastikan bahwa hal itu sesuai dengan aturan dan prinsip syariah islam. Fatwa dan peraturan dewan akan mengikat lembaga keuangan syariah.

Dalam penelitian ini Dewan Pengawas Syariah diukur dengan tiga pengukuran. Pengukuran tersebut adalah jumlah DPS, rata-rata latar belakang pendidikan DPS (skor 3 jika memiliki latar belakang ekonomi syariah, skor 2 jika memiliki latar belakang ekonomi atau hukum Islam, dan selain itu diberi skor 1)

dan rata-rata tingkat pendidikan DPS (dokter diberi skor 3, magister diberi skor 2, dan lainnya diberi skor 1) (Mukhibad, 2018).

3.3.7 Dewan Komisaris

Dewan komisaris menurut Khairandy dan Malik, (2007) merupakan organ perseroan yang bertugas untuk mengawasi kebijakan yang dibuat oleh direksi dan juga mengawasi urusan perseroan secara umum. Komisaris juga membantu direksi dengan memberikan saran atau nasihat pada direksi dalam mengelola perseroan. Fungsi pengawasan komisaris termasuk juga didalamnya kewenangan dan tugas untuk melakukan intervensi dalam pengelolaan perseroan ketika dipandang perlu dan mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang dibutuhkan demi kepentingan sesuai dengan aturan yang ada dalam anggaran dasar dan undang-undang, serta mengawasi pembukuan perseroan dan memiliki akses yang tidak terbatas dalam perseroan.

Dalam penelitian ini dewan komisaris diukur dengan jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh bank (Mukhibad, 2018)

Definisi operasional mengenai variabel penelitian secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
1.	<i>Financial, social and sharia disclosure accountability</i>	Pengungkapan memiliki arti bahwasanya informasi diungkapkan dengan jelas, akurat, lengkap, dapat dipercaya dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya pada suatu perusahaan.	$\frac{\text{jumlah score disclosure yang dipenuhi}}{\text{jumlah item maksimum}}$ (Sherif <i>et al.</i> , 2018)

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
		Pengungkapan akuntabilitas meliputi pengungkapan keuangan, sosial dan syariah.	
2.	Profitabilitas	Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu	$\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$ (Sherif <i>et al.</i> , 2018)
3.	Ukuran Bank	Suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain	$\text{Ukuran Bank} = \text{Ln Total Asset}$ (Sherif <i>et al.</i> , 2018)
4.	Leverage	Rasio <i>leverage</i> digunakan untuk menjelaskan penggunaan utang untuk membiayai sebagian daripada aktiva perusahaan.	$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ (Sherif <i>et al.</i> , 2018)
5.	<i>Investment Account Holder</i> (IAH)	Struktur kepemilikan pada perbankan yang sumbernya berasal dari dana nasabah. Penelitian ini <i>diproxy</i> dengan dana syirkah temporer.	$\frac{\text{Total Dana Syirkah Temporer}}{\text{Modal disetor penuh pemegang saham}}$ (Farook <i>et al.</i> , 2011)
6.	Dewan Pengawas Syariah	sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua <i>stakeholder</i> dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan	1. Jumlah DPS 2. Rata-rata latar belakang pendidikan DPS = Skor 3 jika memiliki latar belakang ekonomi syariah, skor 2 jika memiliki latar belakang ekonomi atau hukum Islam, dan selain itu diberi skor 1

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
		epistemologi sosialilmiah islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah.	3. Rata-rata tingkat pendidikan DPS = doktor diberi skor 3, magister diberi skor 2, dan lainnya diberi skor 1 (Mukhibad, 2018)
7.	Dewan Komisaris	Organ perseroan yang bertugas untuk mengawasi kebijakan yang dibuat oleh direksi dan juga mengawasi urusan perseroan secara umum.	Jumlah dewan komisaris yang dimiliki bank (Mukhibad, 2018)

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi berupa pengumpulan data sekunder. Data sekunder dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan tahunan (*annual report*) yang diperoleh dari *website* resmi masing-masing bank syariah.

3.5 Metode Analisa Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *cross section* (data yang dikumpulkan dalam satu periode waktu) dan *time series* (data yang bentuknya bersifat periodik) (Sakti, 2018). Berkaitan dengan data yang bersifat panel, maka metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi data panel. . Metode regresi data panel adalah metode regresi yang digunakan pada data penelitian yang menggunakan data panel (Sakti, 2018).

Regresi merupakan metode analisis yang digunakan untuk menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Sebelum memulai pengujian dengan bantuan alat analisis *evIEWS*, terlebih dahulu peneliti akan melakukan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui karakteristik data yang dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan profil variabel penelitian secara individual (Wahyudin, 2015). Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Pengukuran yang digunakan untuk analisis statistik deskriptif meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata – rata (mean), dan standar deviasi

3.5.2 Tahapan Regresi Data Panel

Metode regresi data panel memiliki beberapa tahapan yakni pemilihan model regresi, pengujian asumsi klasik, dan interpretasi model (Sakti, 2018). Metode yang digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel adalah dengan menggunakan tiga pendekatan antara lain *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* (Widarjono, 2007). Teknik pengolahan data pada penelitian ini dibantu dengan program statistik *evIEWS*. *EvIEWS* lebih direkomendasikan untuk mengolah data menggunakan teknik regresi data panel. Dengan *evIEWS*, pemilihan model regresi serta pengujian asumsi klasik akan lebih mudah untuk dilakukan dan

hasilnya pun lebih mudah dipahami dibandingkan dengan program statistik lainnya (Sakti, 2018).

Model persamaan regresi data panel dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = variabel terikat

X_{it} = variabel bebas

t = periode ke-t

i = entitas ke-i

α = konstanta

e = variabel diluar model

Tujuan analisis regresi adalah untuk melakukan estimasi atau perkiraan suatu parameter model dan pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Terdapat tiga teknik untuk mengestimasi parameter model regresi dengan data panel menurut Widarjono (2017) antara lain:

1. Model *Common Effect*

Model *Common Effect* adalah model paling sederhana hanya dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section* tanpa melihat perbedaan waktu dan entitas karena perilaku antar data dari suatu entitas sama dalam

berbagai kurun waktu. Pendekatan yang dipakai dalam model *common effect* yaitu metode *Ordinary Least Square* (OLS).

2. Model *Fixed Effect*

Model *fixed effect* mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Model *fixed effect* mengasumsikan bahwa intersep antar perusahaan berbeda namun intersep antar waktu sama dengan slope tetap antarperusahaan dan antar waktu.

3. Model *Random Effect*

Model *random effect* ini menggunakan variabel gangguan (*error terms*) yang mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model ini cocok digunakan ketika sampel dipilih secara random dan merupakan wakil dari populasi. Metode yang digunakan untuk mengestimasi model *random effect* adalah *Generalized Least Squares* (GLS).

Dari ketiga model tersebut, akan dipilih satu metode yang paling tepat untuk melakukan analisis data pada penelitian ini. Pemilihan model yang tepat apakah *common effect*, *fixed effect* atau *random effect* adalah dengan melakukan tiga uji yakni uji *chow*, uji *lagrange multiplier* dan uji *hausman* (Widarjono, 2017).

a. uji *chow*

Uji *chow* merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel apakah memilih

model *fixed effect* lebih baik dari regresi data panel tanpa variabel dummy atau model *common effect*. Keputusan yang diambil yakni apabila:

1. Nilai $\text{prob.F} < \text{batas kritis } 0,05$, maka tolak H_0 atau memilih *fixed effect* daripada *common effect* dan lanjut ke uji hausman.
2. Nilai $\text{prob.F} > \text{batas kritis } 0,05$, maka terima H_0 atau memilih *common effect* daripada *fixed effect* dan lanjut ke uji lagrange multiplier.

b. Uji *hausman*

Uji *hausman* merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel apakah memilih model *fixed effect* dan model *random effect* lebih baik dari metode *common effect*. Keputusan yang diambil yakni apabila:

1. Nilai *chi square* hitung $> \text{chi square}$ tabel atau nilai probabilitas *chi square* $< \text{taraf signifikansi } 0,05$, maka tolak H_0 atau memilih *fixed effect* daripada *random effect*.
2. Nilai *chi square* hitung $< \text{chi square}$ tabel atau nilai probabilitas *chi square* $> \text{taraf signifikansi } 0,05$, maka terima H_0 atau memilih *random effect* daripada *fixed effect*.

c. Uji *lagrange multiplier*

Uji *lagrange multiplier* merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel apakah memilih model *random effect* atau model *common effect* (OLS). Keputusan yang diambil yakni apabila:

1. Nilai *p value* hitung $<$ batas kritis 0,05, maka tolak H_0 atau memilih *random effect* daripada *common effect*.
2. Nilai *p value* hitung $>$ batas kritis 0,05, maka terima H_0 atau memilih *common effect* daripada *random effect*.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan data. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokolerasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Namun menurut Basuki (2016) pada regresi data panel hanya menggunakan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas karena menurutnya uji normalitas bukan merupakan syarat BLUE (Best Linier Unbias Estimator) dan adanya kemungkinan terdapat hubungan antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (autokolerasi) hanya terjadi pada data runtut waktu (time series) sehingga pada regresi data panel tidak diperlukan uji autokolerasi.

1. Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan ketika menggunakan lebih dari satu variabel independen pada model regresi. Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear diantara variabel independen. Akibatnya banyak variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen meskipun nilai determinasi tinggi. Menurut Sakti (2018), metode yang pas untuk melakukan uji multikolinearitas adalah metode korelasi berpasangan karena metode ini dapat mengetahui dengan rinci variabel independen mana saja yang memiliki hubungan yang kuat. Keputusan yang diambil pada metode korelasi berpasangan jika:

1. Nilai korelasi dari masing-masing variabel independen $< 0,85$ maka tidak menolak H_0 atau tidak terjadi multikolinearitas.
2. Nilai korelasi dari masing-masing variabel independen $> 0,85$ maka tolak H_0 atau terjadi multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dalam model regresi dari residual satu observasi ke observasi lain. Kondisi heteroskedastisitas adalah kondisi dimana terdapat ketidaksamaan varian dalam model regresi yang dapat mengakibatkan hasil uji t dan uji F tidak akurat sehingga diharapkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas antara lain metode *informal*, *park*, *glejser*, *korelasi spearman*, *goldfeld-quandt*, *breusch-pagan* dan *white*. Sakti (2018) merekomendasikan metode *white* dalam melakukan uji heteroskedastisitas. Keputusan metode *lagrange multiplier* jika:

1. Nilai *chi square* hitung $<$ *chi square* tabel atau probabilitas *chi square* $>$ taraf signifikansi 0,05, maka terima H_0 atau tidak terdapat heteroskedastisitas.
2. Nilai *chi square* hitung $>$ *chi square* tabel atau probabilitas *chi square* $<$ taraf signifikansi 0,05, maka tolak H_0 atau terdapat heteroskedastisitas.

3.5.4 Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model untuk mengidentifikasi layak atau tidaknya model regresi yang terbentuk dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen. Uji kelayakan model antara lain uji hipotesis dan koefisien determinasi. Menurut Sakti (2018), jika penelitian berlandaskan oleh hasil penelitian terdahulu maka akan lebih relevan jika menggunakan uji hipotesis satu arah.

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mencerminkan seberapa besar variasi variabel independen dapat menerangkan variabel dependen. Menurut Widarjono (2017) nilai R^2 terletak antara 0 dan 1. Sebuah model dikatakan baik apabila nilai R^2 mendekati nilai 1 dan sebaliknya jika nilai R^2 mendekati 0 maka model dikatakan tidak baik.

b. Uji Hipotesis

Pengujian untuk mengetahui signifikansi koefisien regresi. Hipotesis diputuskan dengan membandingkan t statistik terhadap t tabel atau nilai probabilitas terhadap taraf signifikansi.

1) Uji F, untuk melakukan uji hipotesis koefisien atau slope regresi secara bersama sama serta memastikan layak atau tidak model yang dipilih untuk menginterpretasikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini menentukan relevansi uji t, apabila uji F tidak lulus maka hasil uji t akan menjadi tidak relevan. Keputusan diambil jika:

- a. Nilai F hitung $>$ F tabel atau nilai probabilitas F-statistik $<$ taraf signifikansi, maka tolak H_0 atau variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

- b. Nilai F hitung $< F$ tabel atau nilai probabilitas F -statistik $>$ taraf signifikansi, maka terima H_0 atau variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Uji t , untuk melakukan uji koefisien regresi secara individu. Keputusan diambil jika:
- a. Uji dua arah
 1. Nilai t hitung $>$ t tabel atau nilai probabilitas t -statistik $<$ taraf signifikansi, maka tolak H_0 atau variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen.
 2. Nilai t hitung $<$ t tabel atau nilai probabilitas t -statistik $>$ taraf signifikansi, maka terima H_0 atau variabel independen secara individu tidak mempengaruhi variabel dependen.
 - a. Uji satu arah sisi kanan (positif)
 1. Nilai t hitung $>$ t tabel, maka tolak H_0 atau variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.
 2. Nilai t hitung $<$ t tabel, maka terima H_0 atau variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Selain itu apabila:

1. Nilai probabilitas t -statistik $<$ taraf signifikansi, maka variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Nilai probabilitas t-statistik $>$ taraf signifikansi, maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
 - b. Uji satu arah sisi kiri (negatif)
 1. Nilai t hitung $<$ -t tabel, maka tolak H_0 atau variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen.
 2. Nilai t hitung $>$ -t tabel, maka terima H_0 atau variabel independen tidak berpengaruh negatif terhadap variabel dependen.

Selain itu apabila:

1. Nilai probabilitas t-statistik $<$ taraf signifikansi, maka variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Nilai probabilitas t-statistik $<$ taraf signifikansi, maka variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berikut ini merupakan hasil dari uji statistik deskriptif untuk melihat karakteristik data penelitian

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel N =64	Statistik Deskriptif				
	Mean	Median	Max	Min	Std.Dev
Variabel Dependen <i>Disclosure Accountability</i>	0.671406	0.670000	0.840000	0.450000	0.088297
Variabel Independen ROA <i>Leverage IAH Size</i>	0.807500	0.915000	3.810000	-10.77000	1.686165
DPS	17.27203	16.13000	32.69000	2.800000	6.172838
Dewan	13.79437	7.695000	44.34000	2.410000	12.75380
Komisaris	3019.578	2982.000	3222.000	2765.000	118.1783
	7.247344	7.000000	9.000000	6.500000	0.732697
	3.859375	4.000000	6.000000	3.000000	0.989904

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.1 hasil uji statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat informasi mengenai nilai mean (rata-rata); median (nilai tengah), minimum (nilai terendah), maksimum (nilai tertinggi) dan standar deviasi untuk setiap data variabel penelitian. melalui statistik deskriptif karakteristik data dapat diketahui. Berikut penjelasan mengenai analisis statistik deskriptif atas

variabel pengungkapan akuntabilitas sebagai variabel dependen dan variabel ROA, *leverage*, IAH, *size*, DPS, dewan komisaris sebagai variabel independen.

4.1.1.1 Analisis Statistik Deskriptif Pengungkapan Akuntabilitas

Penelitian ini menggunakan variabel pengungkapan akuntabilitas sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan indeks pengungkapan yang dikutip dari Sherif et al., (2018) yang diperoleh dari *content analysis* dimana setiap pengungkapan diberi nilai 1 dan 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan kemudian dari hasil *content analysis* diperoleh tingkat pengungkapan dengan membagi jumlah score disclosure yang dipenuhi dengan jumlah item maksimum. Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan rata-rata pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah) di perbankan Indonesia tahun 2011-2018 sebesar 0,671406 atau sebesar 67%. Nilai tersebut diatas 50% sehingga dapat dikatakan pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial dan syariah) di Indonesia cukup tinggi. Nilai minimum sebesar 0,450000 dimiliki oleh Bank Panin Syariah pada tahun 2011 yang menunjukkan bahwa Bank Panin Syariah (BPS) memiliki tingkat pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial dan syariah) yang rendah dibandingkan perbankan lainnya pada tahun tersebut. Nilai maksimum sebesar 0,840000 atau 84% dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah lebih terbuka dibandingkan dengan perbankan lainnya dan lebih tinggi diatas 50%. Standar deviasi sebesar 0,088297 lebih kecil dari nilai rata-rata, nilai mean yang lebih tinggi menunjukkan representasi yang baik untuk penyebaran data.

4.1.1.2 Analisis Statistik Deskriptif Profitabilitas

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan ROA (*return on asset*). Hasil dari analisis statistik deskriptif pada tabe 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata nilai ROA sebesar 0,807500 yang mengindikasikan bahwa kemampuan rata-rata perbankan dalam menghasilkan laba yaitu 0,80%. Nilai maksimal ROA 3,810000 dimiliki oleh Bank Mega Syariah pada tahun 2012 yang berarti kemampuan Bank Mega Syariah (BMS) dalam menghasilkan laba paling tinggi adalah 3,81% dibandingkan perbankan syariah lainnya pada jangka waktu tahun 2011-2018. Nilai minimum ROA sebesar -10,77000 yang dimiliki oleh Bank Panin Syariah (BPS) pada tahun 2017 yang berarti bahwa kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba bernilai negatif yaitu -10,77% dibandingkan perbankan syariah lainnya. Nilai standar deviasi ROA sebesar 1,686165 yang lebih besar dari nilai rata-rata ROA sehingga dapat dikatakan simpangan datanya lebih besar, artinya variabel profitabilitas yang diukur menggunakan ROA memiliki persebaran data yang bervariasi

4.1.1.3 Analisis Statistik Deskriptif Leverage

Leverage diukur menggunakan DAR (*debt of asset ratio*). Hasil analisis statistik deskriptif dari variabel leverage pada tabel 4.1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 17,27203 yang berarti bahwa 17,27% aset yang dimiliki perbankan dibiayai oleh hutang dan lebih banyak dibiayai oleh modal sebesar 82,73% . Sedangkan nilai maksimum leverage 32,69000 dimiliki oleh Bank Mega Syariah (BMS) pada tahun 2011 yang berarti bahwa 32,69 % aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh hutang, 67,31% dibiayai oleh modal. Nilai minimum leverage sebesar 2,80000

dimiliki oleh Bank Panin Syariah (BPS) pada tahun 2011 yang berarti bahwa 2,80% aset yang dimiliki Bank Panin Syariah dibiayai oleh hutang dan sisanya dibiayai oleh modal, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2018. Standar deviasi leverage 6,172838 lebih besar dari nilai rata-rata artinya variabel leverage memiliki persebaran data yang bervariasi.

4.1.1.4 Analisis Statistik Deskriptif Islamic Account Holder (IAH)

IAH diukur dengan menggunakan rasio dana syirkah temporer dibagi dengan modal disetor penuh pada laporan tahunan bank umum syariah. Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata IAH sebesar 13,79437 yang berarti bahwa 13,79 % struktur kepemilikan pada perbankan bersumber dari dana nasabah. Nilai maksimum IAH sebesar 44,34000 atau 44,34% dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 2014. Nilai minimum IAH sebesar 2,41000 atau sebesar 2,41% yang dimiliki oleh Bank Central Asia Syariah (BCAS) pada tahun 2011. Standar deviasi IAH yaitu 12,75380 lebih kecil dari rata-rata, yang berarti bahwa sebaran data mempunyai penyimpangan yang kecil. Semakin kecil sebarannya maka variasi nilai datanya semakin sama (homogen) dan tidak dapat perbedaan yang tinggi antara data yang satu dengan data yang lainnya.

4.1.1.5 Analisis Statistik Deskriptif Size

Ukuran perusahaan diukur mengukur Ln total aset. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata variabel *size* sebesar 3019,578 yang berarti rata-rata *size* perbankan syariah yaitu 30,19%. Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai maksimum *size* sebesar 3222,000 dimiliki oleh

Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2018 yang berarti bahwa BSM memiliki aset yang lebih tinggi sebesar 32,22% dibandingkan dengan perbankan syariah lainnya. Nilai minimum size sebesar 2765,000 dimiliki oleh Bank Panin Syariah (BPS) pada tahun 2011 dibandingkan dengan perbankan syariah lainnya Bank Panin Syariah memiliki total aset yang cukup rendah sebesar 27,65 % . Standar deviasi size sebesar 118,1783 yang lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu 11,81% yang berarti sebaran datanya mempunyai penyimpangan yang kecil.

4.1.1.6 Analisis Statistik Deskriptif Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS merupakan badan independen ahli hukum khusus dalam fiqh muamalah, penelitian ini menggunakan variabel dummy untuk mengukur variabel DPS dengan menggunakan indikator jumlah DPS, latar belakang pendidikan DPS, dan tingkat pendidikan DPS. Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata ukuran DPS 7,247344 yang berarti bahwa rata-rata jumlah DPS pada perbankan syariah terdapat 41 unit analisis atau 64,06% beranggotakan 2 orang DPS dan 23 unit analisis atau 35,94% beranggotakan 3 orang DPS. Serta, rata-rata tingkat pendidikan DPS dengan gelar doktor sebesar 80,79% yang diberi skor 3 dan magister 19,21 % yang diberi skor 2 dan rata-rata latar belakang pendidikan DPS adalah 30,46% berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah yang diberi skor 3, berlatar belakang pendidikan ekonomi atau hukum Islam sebesar 49,66% yang diberi skor 2, berlatar belakang pendidikan selain ekonomi syariah, ekonomi dan hukum Islam sebesar 19,20% yang diberi skor 1. Nilai standar deviasi ukuran DPS 0,732697. Standar deviasi yang lebih kecil dari

nilai rata-rata yang berarti bahwa sebaran data tidak jauh berbeda atau simpangan datanya relatif kecil.

4.1.1.7 Analisis Statistik Deskriptif Dewan Komisaris

Dewan komisaris yang bertugas mengawasi kebijakan yang dibuat oleh direksi diukur dengan jumlah dewan komisaris yang dimiliki perusahaan. Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dewan komisaris 3.859375 yang berarti bahwa rata-rata perbankan syariah memiliki tiga dewan komisaris . Nilai maksimum dewan komisaris sebesar 6.000000 yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 2011-2015 selain BMI perbankan syariah dalam kurun waktu 2011-2018 tidak ada yang memiliki dewan komisaris sampai dengan enam anggota. Nilai minimum dewan komisaris sebesar 3.000000 yang dimiliki oleh Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) pada tahun 2011-2015, Bank Mega Syariah (BMS) tahun 2011-2018, Bank Panin Syariah (BPS) tahun 2011-2015 dan tahun 2018, Bank Bukopin Syariah (BBS) 2011-2014, dan BCAS tahun 2011-2018. Standar deviasi variabel dewan komisaris sebesar 0,989904 lebih kecil dari nilai rata-ratanya yang berarti bahwa sebaran data tidak jauh berbeda atau simpangan datanya relatif kecil.

4.1.2 Hasil Analisis Regresi Berganda

4.1.2.1 Estimasi Model Regresi Data Panel

Estimasi model regresi data panel bertujuan untuk menentukan model regresi yang tepat dalam melakukan uji hipotesis. Terdapat tiga pendekatan model dalam estimasi model regresi data panel, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed*

Effect Model (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Diantara ketiga model tersebut akan dipilih model regresi yang paling tepat.

1) *Common effect Model* (CEM)

Estimasi model regresi data panel yang pertama yaitu dengan *common effect model* melalui pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS). Pengujian dilakukan dengan bantuan alat analisis Eviews 9. Hasil regresi data panel dengan *common effect model* dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Estimasi *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.514188	0.289294	-5.234086	0.0000
ROA	-0.001425	0.004164	-0.342285	0.7334
LEVERAGE	-0.000684	0.001256	-0.544659	0.5881
IAH	-0.000984	0.001230	-0.800086	0.4270
SIZE	0.000733	0.000103	7.110008	0.0000
DPS	0.004377	0.013980	0.313113	0.7553
DEKOM	-0.008181	0.012268	-0.666901	0.5075
R-squared	0.678047	Mean dependent var		0.671406
Adjusted R-squared	0.644157	S.D. dependent var		0.088297
S.E. of regression	0.052672	Akaike info criterion		-2.946563
Sum squared resid	0.158135	Schwarz criterion		-2.710435
Log likelihood	101.2900	Hannan-Quinn criter.		-2.853540
F-statistic	20.00738	Durbin-Watson stat		1.229908
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2020

Pada tabel 4.2 dapat diketahui nilai *adjusted R-squared* sebesar 64,41% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 64,41% dan sisanya 35,59% dijelaskan oleh variabel lain diluar regresi. Terdapat satu variabel yang berpengaruh pada pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah). Variabel tersebut adalah

size dengan koefisien 0,000733 dan tingkat signifikansi 0,0000. Variabel lainnya yaitu profitabilitas, *leverage*, IAH, DPS dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas.

2) *Fixed Effect Model* (FEM)

Model *fixed effect* mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan intersep di dalam persamaan serta menggunakan variabel dummy untuk mengetahui adanya perbedaan intersep tersebut. Hasil estimasi dengan *fixed effect model* dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Estimasi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.716510	0.476044	-3.605778	0.0007
ROA	-0.001159	0.004067	-0.285012	0.7768
LEVERAGE	-0.001074	0.001751	-0.613361	0.5424
IAH	-0.001941	0.002353	-0.825004	0.4133
SIZE	0.000848	0.000149	5.709476	0.0000
DPS	-0.013996	0.023738	-0.589629	0.5581
DEKOM	-0.006564	0.013173	-0.498314	0.6204

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.761957	Mean dependent var	0.671406
Adjusted R-squared	0.700065	S.D. dependent var	0.088297
S.E. of regression	0.048357	Akaike info criterion	-3.029767
Sum squared resid	0.116921	Schwarz criterion	-2.557511
Log likelihood	110.9525	Hannan-Quinn criter.	-2.843721
F-statistic	12.31121	Durbin-Watson stat	1.629650
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data sekunder yang diolah 2020

Pada tabel 4.3 dapat diketahui nilai *adjusted R-squared* sebesar 70,00% atau lebih besar dari *common effect model* sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 70,00% dan sisanya 30,00% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi. Terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel tersebut adalah *size* dengan koefisien sebesar 0,000848 dan tingkat signifikansi 0,0000. Variabel indepen lainnya yaitu ROA, *leverage*, IAH,DPS dan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas.

3) *Random Effect Model* (REM)

Random effect model menggunakan variabel gangguan (*error terms*) untuk mengatasi kelemahan pada penggunaan variabel dummy. Penggunaan variabel dummy dapat mengurangi tingkat kebebasan (*degree of freedom*) sehingga dapat mengurangi efisiensi parameter. *Random effect model* menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS). Hasil estimasi *random effect model* dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Estimasi *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.733880	0.400862	-4.325385	0.0001
ROA	-0.001119	0.004002	-0.279582	0.7808
LEVERAGE	-0.001131	0.001631	-0.693399	0.4909
IAH	-0.001517	0.001695	-0.895251	0.3744
SIZE	0.000840	0.000135	6.231090	0.0000
DPS	-0.008467	0.020682	-0.409374	0.6838
DEKOM	-0.007037	0.012863	-0.547077	0.5865
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.061982	0.6216
Idiosyncratic random			0.048357	0.3784
Weighted Statistics				
R-squared	0.468884	Mean dependent var		0.178531
Adjusted R-squared	0.412977	S.D. dependent var		0.060016
S.E. of regression	0.045982	Sum squared resid		0.120520
F-statistic	8.386863	Durbin-Watson stat		1.589521
Prob(F-statistic)	0.000002			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.664126	Mean dependent var		0.671406
Sum squared resid	0.164972	Durbin-Watson stat		1.161219

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2020

Pada tabl 4.4 dapat diketahui nilai *adjusted R-squared* sebesar 41,29%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian mamapu menjelaskan variabel dependen sebesar 41,29% dan sisanya sebesar 58,71% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi. Semenara itu dari hasil uji REM hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel tersebut adalah *size* dengan koefisisen 0,000840 dan tingkat signifikansi

0,0000. Selain itu, variabel profitabilitas, *leverage* IAH, DPS dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas.

4.1.2.2 Pengujian Model Regresi Data Panel

1) Uji Chow

Hipotesis pada chow test dapat adalah sebagai berikut :

H_0 : model yang terpilih adalah *common effect model* (lanjut ke *Lagrange Multiplier test*)

H_1 : model yang terpilih adalah *fixed effect model* (lanjut ke *Hausman test*)

Berikut ini merupakan hasil uji Chow yang dapat dilihat pada tabel 4.5 .

Tabel 4.5 Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.517849	(7,50)	0.0268
Cross-section Chi-square	19.325047	7	0.0072

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2020

Probabilitas *cross section F* pada tabel 4.5 menunjukkan nilai 0,0268. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu $\alpha = 5\%$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima dan berdasarkan uji *chow* model yang paling tepat antara *common effect model* dan *fixed effect model* adalah *fixed effect model*.

2) Uji Hausman

Hasil uji *chow* yang terpilih adalah *fixed effect model*, sehingga pengujian selanjutnya adalah uji hausman untuk memilih model yang paling tepat antara *fixed effect model* dan *random effect model*. Model yang terpilih pada uji hausman merupakan model yang akan digunakan sebagai model data panel dalam uji hipotesis.

Berikut ini adalah hipotesis pada uji hausman :

H_0 : model yang terpilih adalah *random effect model*

H_1 : model yang terpilih adalah *fixed effect model*

Hasil uji Hausman dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.539312	6	0.9973

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2020

Pada tabel 4.6 nilai probabilitas sebesar 0,9973. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yaitu $\alpha = 5\%$. Dapat didimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga berdasarkan hasil dari uji hausman model yang paling tepat antara *fixed effect model* dan *random effect model* adalah *random effect model*.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kolerasi antar variabel independen. Model regresi data panel dikatakan baik apabila terbebas dari masalah multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas

	ROA	LEVERAGE	IAH	SIZE	DPS	DEKOM
ROA	1	0.121611	0.001916	-0.049535	0.095232	-0.155316
LEVERAGE	0.121611	1	-0.053065	0.225772	-0.081051	0.208145
IAH	0.001916	-0.053065	1	0.772072	0.704565	0.728810
SIZE	-0.049535	0.225772	0.772072	1	0.546438	0.732177
DPS	0.095232	-0.0810516	0.704565	0.546438	1	0.333219
DEKOM	-0.155316	0.208145	0.728810	0.732177	0.3332193	1

Sumber : Data sekunder yang diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.7 uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa korelasi antar variabel independen dibawah nilai yang telah ditetapkan yaitu 0,8 sehingga regresi data panel pada penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

4.1.3.2 Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk memastikan bahwa residual mempunyai varian yang sama (homoskedastisitas). Pada peneltian ini peneliti menggunakan uji white untuk menguji ada tidaknya masalah heterokedastisitas pada model regresi data panel. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai Obs*R-squared. Jika nilainya lebih dari $\alpha = 5\%$ maka dapat dikatakan bahwa model regresi data panel tidak memiliki masalah heterokedastisitas.

Tabel 4.8 Uji Heterokedastisitas – Uji White

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.424139	Prob. F(27,36)	0.1594
Obs*R-squared	33.05379	Prob. Chi-Square(27)	0.1953
Scaled explained SS	14.50947	Prob. Chi-Square(27)	0.9758

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2020

Berdasarkan hasil uji white pada tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa nilai Obs*R-squared sebesar 33.05379 lebih besar dari $\alpha=5\%$, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi data panel pada penelitian ini tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

4.1.4 Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil uji *chow* dan uji hausman, model regresi data panel yang terpilih adalah *random effect model*, sehingga hasil regresi data panel dengan random effect model yang akan digunakan sebagai dasar analisis regresi dalam melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil regresi data panel dengan menggunakan *random effect model* dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Regresi Data Panel-Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.733880	0.400862	-4.325385	0.0001
ROA	-0.001119	0.004002	-0.279582	0.7808
LEVERAGE	-0.001131	0.001631	-0.693399	0.4909
IAH	-0.001517	0.001695	-0.895251	0.3744
SIZE	0.000840	0.000135	6.231090	0.0000
DPS	-0.008467	0.020682	-0.409374	0.6838
DEKOM	-0.007037	0.012863	-0.547077	0.5865

Sumber Data sekunder yang diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dibentuk persamaan regresi pada penelitian ini, sebagai berikut :

$$Y_{it} = -1.733880 + -0.001119_1X_{1it} + -0.001131_2X_{2it} + -0.001517_3X_{3it} + 0.000840_4X_{4it} + -0.008467_5X_{5it} + -0.007037_6X_{6it} + eit$$

Persamaan regresi data panel tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Konstanta -1.733880

Jika seluruh variabel independen pada penelitian ini dianggap tetap atau konstan, maka nilai pengungkapan akuntabilitas sebesar -1.733880.

- 2) Koefisien paramater ROA atau profitabilitas adalah -0.001119. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas memiliki arah negatif terhadap pengungkapan akuntabilitas.

- 3) Koefisien paramater *leverage* adalah -0.001131. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* memiliki arah negatif terhadap pengungkapan akuntabilitas.

- 4) Koefisien parameter IAH atau *investmen account holder* adalah -0.001517. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IAH memiliki arah negatif terhadap pengungkapan akuntabilitas.
- 5) Koefisien parameter *size* adalah 0.000840. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *size* memiliki arah positif terhadap pengungkapan akuntabilitas.
- 6) Koefisien parameter DPS atau dewan pengawas syariah adalah -0.008467. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DPS memiliki arah negatif terhadap pengungkapan akuntabilitas.
- 7) Koefisien parameter DEKOM atau dewan komisaris adalah -0.007037. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris memiliki arah negatif terhadap pengungkapan akuntabilitas.

Pengujian hipotesis selanjutnya terdiri dari koefisien determinasi (*adjusted R²*), uji simultan (Uji F) dan uji parsial (Uji t), penjelasan lebih lanjut untuk masing-masing uji adalah sebagai berikut:

4.1.4.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi dari variabel independen dalam model regresi data panel dapat menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen yang berupa profitabilitas, leverage, IAH, *size*, DPS dewan komisaris dalam menjelaskan pengungkapan akuntabilitas.

Nilai *adjusted R²* dalam model regresi data panel pada penelitian ini sebesar 0.412977, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen mampu

menjelaskan variabel dependen yaitu pengungkapan akuntabilitas sebesar 41,29%. Sementara itu, sisanya sebesar 58,71 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi data panel pada penelitian ini. Nilai koefisien determinasi R^2 tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10 Koefisien Determinasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.468884	Mean dependent var	0.178531
Adjusted R-squared	0.412977	S.D. dependent var	0.060016
S.E. of regression	0.045982	Sum squared resid	0.120520
F-statistic	8.386863	Durbin-Watson stat	1.589521
Prob(F-statistic)	0.000002		

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2020

4.1.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis pada uji F antara lain :

H_0 : seluruh variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
dimana H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F\text{-statistik} < F\text{-tabel}$.

H_1 : seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen
dimana H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F\text{-statistik} > F\text{-tabel}$.

Berdasarkan tabel 4.10 nilai F-statistik adalah 8.386863 dengan jumlah unit analisis 64 dan 6 variabel penelitian sehingga di dapat nilai F-tabel adalah 2,26 atau nilai F-statistik lebih besar dari nilai F-tabel. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga hasil dari uji F menunjukkan bahwa variabel independen

yang terdiri dari profitabilitas, *leverage*, *investment account holder*, *size*, dewan pengawas syariah dan dewan komisaris secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu pengungkapan akuntabilitas.

4.1.4.3 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hipotesis pada uji t antara lain :

H_0 : variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dimana H_0 diterima dan H_1 ditolak jika $t\text{-statistik} < t\text{-tabel}$.

H_1 : variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dimana H_0 ditolak dan H_1 diterima jika $t\text{-statistik} > t\text{-tabel}$.

Nilai t-tabel dengan unit analisis 64 dan jumlah variabel 6 adalah 1.67203. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4.11 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Prediksi Tanda	Hasil
ROA	-0.001119	0.004002	-0.279582	0.7808	-	Ditolak
LEVERAGE	-0.001131	0.001631	-0.693399	0.4909	-	Ditolak
IAH	-0.001517	0.001695	-0.895251	0.3744	-	Ditolak
SIZE	0.000840	0.000135	6.231090	0.0000	+	Diterima
DPS	-0.008467	0.020682	-0.409374	0.6838	-	Ditolak
DEKOM	-0.007037	0.012863	-0.547077	0.5865	-	Ditolak

Sumber : Data sekunder yang dioalah tahun 2020

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Profitabilitas yang diukur menggunakan ROA berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas .Berdasarkan tabel 4.11, nilai koefisien variabel ROA adalah -0.001119 dengan

nilai t-statistik sebesar -0.279582 dan nilai t-tabel 1.67203 atau nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel . Sementara itu nilai *p value* variabel ROA 0.7808 atau lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Sehingga **H₁ ditolak** dan dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas. Berdasarkan tabel 4.11, nilai koefisien variabel leverage adalah -0.001131 dengan nilai t-statistik sebesar -0.693399 dan nilai t-tabel 1.67203 atau nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel . Sementara itu nilai *p value* variabel leverage adalah 0.4909 atau lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Sehingga **H₂ ditolak** dan dapat disimpulkan bahwa variabel leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa *investment account holder* (IAH) berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas. Berdasarkan tabel 4.11, nilai koefisien variabel IAH adalah -0.001517 dengan nilai t-statistik sebesar -0.895251 dan nilai t-tabel 1.67203 atau nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel . Sementara itu nilai *p value* variabel IAH adalah 0.3744 atau lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Sehingga **H₃ ditolak** dan dapat disimpulkan bahwa variabel *investment account holder* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa *size* berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas. Berdasarkan tabel 4.11, nilai koefisien variabel size adalah 0.000840 dengan nilai t-statistik sebesar 6.231090 dan nilai t-tabel 1.67203 atau nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel . Sementara itu nilai *p value* variabel size adalah 0.0000 atau lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Sehingga **H₄ diterima**

dan dapat disimpulkan bahwa variabel *size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan akuntabilitas.

Hipotesis kelima menyatakan bahwa dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas. Berdasarkan tabel 4.11, nilai koefisien variabel DPS adalah -0.008467 dengan nilai t-statistik sebesar -0.409374 dan nilai t-tabel 1.67203 atau nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel . Sementara itu nilai *p value* variabel DPS adalah 0.6838 atau lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Sehingga **H₅ ditolak** dan dapat disimpulkan bahwa variabel dewan pengawas syariah (DPS) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas.

Hipotesis keenam menyatakan bahwa dewan komisaris (DEKOM) berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas. Berdasarkan tabel 4.11, nilai koefisien variabel dewan komisaris adalah -0.007037 dengan nilai t-statistik sebesar -0.547077 dan nilai t-tabel 1.67203 atau nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel . Sementara itu nilai *p value* variabel dewan komisaris adalah 0.5865 atau lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Sehingga **H₆ ditolak** dan dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris (DEKOM) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Akuntabilitas

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas, sehingga hipotesis satu (H_1) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap

pengungkapan akuntabilitas ditolak. Artinya semakin tinggi tingkat profitabilitas bank umum syariah tidak mempengaruhi luasnya pengungkapan akuntabilitas.

Profitabilitas dalam penelitian tidak bisa memberikan pengaruhnya terhadap tiga pilar komprehensif pengungkapan akuntabilitas, dikarenakan tanggungjawab sosial bank umum syariah tidak didominasi dari profit atau laba yang diperoleh, namun berasal dari dana zakat, infaq maupun pendapatan non halal. Selain itu tanggung jawab syariah berkaitan dengan kehalalan produk dan kepatuhan bank syariah terhadap fatwa DSN MUI. Hannifah (2002) menyatakan bahwa dalam pandangan Islam perusahaan yang memiliki niat untuk melakukan pengungkapan penuh tidak akan mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi.

Hasil pengujian pada hipotesis pertama tidak sejalan dengan *syariah enterprise theory* yang menyatakan bahwa pengungkapan akuntabilitas penuh kepada Allah sebelum pemangku kepentingan. Apabila kinerja keuangan dalam hal ini diukur menggunakan profitabilitas meningkat maka perbankan syariah akan memperluas pengungkapan akuntabilitas. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur menggunakan profitabilitas tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan penuh terhadap Allah dan pemangku kepentingan lainnya.

Hasil pengujian hipotesis pertama tidak sejalan dengan teori kedua yaitu teori sinyal yang menyatakan perusahaan dapat mengirimkan sinyal kepada investor melalui pengungkapan informasi keuangan, sosial dan syariah yang dimiliki perusahaan guna mengurangi ketidakpastian akan prospek perusahaan

dimasa depan dan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Apabila profitabilitas meningkat maka akan mendorong perbankan syariah dalam memperluas pengungkapan tanggung jawab keuangan, sosial dan syariahnya guna menarik perhatian investor maupun nasabah. Namun, hasil penelitian ini menyatakan hal yang sebaliknya bahwa semakin tinggi profitabilitas tidak mempengaruhi perbankan syariah untuk memperluas pengungkapan tanggungjawab sosial, keuangan dan syariah.

Hasil penelitian ini kontradiksi dengan hasil penelitian dari Albarak dan Sherif, (2019) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas syariah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya oleh (Rahman dan Bukair, 2013; Kurniawati dan Yaya, 2017; Pratama *et al.*, 2018; Sherif *et al.*, 2018) serta didukung oleh penelitian Affandi dan Nursita (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas sosial yang diukur menggunakan ISR.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian El-Halaby dan Hussainey, (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan keuangan, sosial dan syariah perbankan Islam. Hasil penelitian tersebut didukung oleh (Kasih, 2018; Yusoff, 2018) yang menyatakan hal serupa bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.

4.2.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan Akuntabilitas

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas sehingga hipotesis kedua (H2) yang

menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan akuntabilitas ditolak. Artinya, semakin tinggi tingkat *leverage* perbankan syariah tidak mempengaruhi pengungkapan akuntabilitas.

Hasil pengujian hipotesis kedua tidak sejalan dengan teori *shariah enterprise theory* dan *stakeholder theory*, dimana keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan *stakeholder* baik dari internal maupun eksternal. Tingkat *leverage* yang tinggi maka perusahaan akan berusaha untuk menjaga kepercayaan dari kreditor serta membangun *image* yang baik dimata *stakeholdernya*. Salah satu upaya menyeimbangkan tuntutan dari *stakeholder* agar *image* perbankan dalam kondisi yang baik adalah dengan mengungkapkan tanggung jawab keuangan, sosial dan syariahnya. Namun, hasil dari penelitian ini menyatakan hal yang sebaliknya, karena semakin tinggi *leverage* tidak mempengaruhi perbankan dalam memperluas pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sherif *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *financial, social and sharia disclosure accountability*. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian (Rosiana *et al.*, 2015 ; Kasih, 2018; Affandi dan Nursita, 2019) yang mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang diukur dengan menggunakan indeks ISR. Rosiana *et al.*, (2015) menyatakan bahwa tingkat *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah karena *leverage* diukur dengan rasio kewajiban terhadap ekuitas pada bank syariah berbeda dengan entitas

lainnya. Kewajiban pada bank syariah merupakan sumber utama penghasilan laba dengan sistem bagi hasil nisbah keuntungan. Sedangkan entitas non bank, kewajiban merupakan suntikan modal untuk memaksimalkan laba. Sesuai dengan teori *stakeholder* bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak terlepas dari peranan *stakeholder* baik dari dalam maupun luar mengakibatkan pengungkapan terhadap keuangan, sosial dan syariah tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat *leverage* perbankan.

Penelitian ini kontradiksi dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juhmani, (2014) yang mengukur tingkat pengungkapan dengan menggunakan indeks ISR. Juhmani, (2014) berpendapat bahwa semakin tinggi leverage perusahaan, maka semakin banyak kemungkinan bagi perusahaan untuk mengungkapkan akuntabilitas sosialnya. Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian dari (Pratama *et al.*, 2018; Mukhibad, 2018) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

4.2.3 Pengaruh *Investment Account Holders* terhadap Pengungkapan Akuntabilitas

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Investment Account Holders* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas sehingga hipotesis (H3) yang menyatakan bahwa *Investment Account Holders* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan akuntabilitas ditolak. Artinya, semakin tinggi tingkat *Investment Account Holders* bank umum syariah, tidak mempengaruhi perbankan dalam memperluas pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariahnya.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa keberlangsungan perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan stakeholder baik dari internal maupun eksternal perusahaan. IAH yang merupakan nasabah perbankan cenderung menginvestasikan dana mereka dalam bentuk tabungan maupun deposito daripada sebagai pemegang saham. Hal ini karena IAH lebih tertarik dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan. Sehingga sebagai nasabah mereka tidak memiliki hak suara formal untuk mempengaruhi tingkat pengungkapan. Oleh karena itu IAH tidak mempengaruhi seberapa besar pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah perbankan syariah yang diterbitkan melalui annual reportnya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari (Abdullah *et al.*, 2013; Zanjabil dan Adityawarman, 2015) yang menyatakan bahwa IAH tidak berpengaruh terhadap pengungkapan yang diukur menggunakan indeks ISR. Sedangkan hasil penelitian ini kontradiksi dengan penelitian Farook *et al.*, (2011) dan Yusoff (2018) yang mengungkapkan bahwa IAH berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

4.2.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Size*) terhadap Pengungkapan Akuntabilitas

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *size* perbankan berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas. Sehingga, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa *size* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan akuntabilitas diterima. Artinya semakin besar *size* perusahaan akan mempengaruhi tingkat pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial dan syariah) perbankan.

Hasil penelitian ini mendukung *syariah enterprise theory* dan teori keagenan bahwa semakin besar *size* perusahaan maka perlu menunjukkan akuntabilitasnya secara luas tidak terbatas hanya untuk perusahaan sendiri, melainkan kepada Allah sebagai stakeholder serta menunjukkan adanya hubungan positif antara agen dan prinsipal dalam melaksanakan pengungkapan akuntabilitasnya. Ukuran bank syariah yang semakin besar membuat manajemen harus mengungkapkan akuntabilitasnya lebih luas baik akuntabilitas keuangan, sosial maupun syariah. Semakin besar *size* perusahaan maka nilai aset yang dimiliki perusahaan semakin banyak pula, sehingga membutuhkan transparansi dalam perolehan aset penggunaan dan pemeliharaan aset tersebut. Selain itu *size* yang besar mempunyai saham beredar yang dimiliki oleh investor, sehingga membuat pihak investor menuntut adanya transparansi dalam penyajian laporan tahunan serta informasi tambahan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah yang transparan membuat stakeholder percaya akan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaannya maka semakin banyak calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Sherif *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa *size* perusahaan berpengaruh terhadap *financial, social and sharia disclosure accountability*. Bank syariah yang memiliki *size* yang besar dapat memberikan informasi tambahan dalam laporan tahunannya untuk mengungkapkan akuntabilitas perusahaan terhadap semua kelompok pemangku kepentingan, khususnya kepada Allah dan investor Muslim. Hasil penelitian tersebut didukung

oleh El-Halaby dan Hussainey, (2016) serta Nuraeni dan Rini, (2019) yang menyatakan bahwa size berpengaruh terhadap pengungkapan. Hasil penelitian ini kontradiksi dengan hasil penelitian dari (Juhmani, 2014; Affandi dan Nursita, 2019) yang menyatakan bahwa size perusahaan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan akuntabilitas sosial nya.

4.2.5 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Akuntabilitas

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas. Sehingga, hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa DPS berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan akuntabilitas ditolak. Artinya semakin tinggi tingkat DPS tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan keuangan, sosial dan syariah perbankan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan *syariah enterprise theory* dan *stakeholder theory* yang menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari peranan *stakeholder* baik dari internal maupun eksternal perusahaan serta memiliki tanggungjawab kepada Allah sebagai *stakeholder* pertama. DPS tidak mampu menjadi penentu untuk memperkuat pengaruhnya terhadap pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah. Adanya DPS dalam perbankan merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah dalam mencapai tujuannya. Akan tetapi pada hasil penelitian ini dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah yang dilakukan perbankan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Rosiana *et al.*,(2015) dan Sunarto, (2016) yang menyatakan bahwa DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas sosial yang diukur menggunakan indeks ISR. Hasil penelitian DPS yang dihitung menggunakan tiga indikator yaitu jumlah DPS yang dimiliki perbankan syariah, tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan DPS tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan dimungkinkan karena fokus dari DPS dalam perbankan syariah masih terfokus pada tugas dan tanggungjawabnya dalam operasional perbankan syariah, misalnya mengenai persetujuan produk baru, mengawasi apakah akad yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak dan kurang memperhatikan pengungkapan tanggung jawab keuangan, sosial dan syariah yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam menyusun annual reportnya.

Hasil penelitian ini kontradiksi dengan penelitian dari El-Halaby dan Husainey, (2016) yang menyatakan bahwa DPS mempengaruhi tingkat pengungkapan akuntabilitas syariah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh (Kasih, 2018; Yusoff, 2018; Nuraeni dan Rini, 2019) yang menyatakan bahwa DPS berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perbankan.

4.2.6 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Akuntabilitas

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas. Sehingga, hipotesis kelima (H6) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan akuntabilitas ditolak. Artinya semakin tinggi tingkat Dewan

Komisaris tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan keuangan, sosial dan syariah perbankan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan *syariah enterprise theory* dan *stakeholder theory* yang menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari peranan *stakeholder* baik dari internal maupun eksternal perusahaan serta memiliki tanggungjawab kepada Allah sebagai *stakeholder* pertama. Dewan komisaris yang memiliki fungsi sebagai pengawas dan penasihat terhadap direksi perusahaan tidak mampu membantu dalam mengungkapkan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah perusahaan. Hal ini dikarenakan dewan komisaris hanya memiliki kewenangan dalam memberikan nasihat, saran serta mengangkat, dan memberhentikan direksi. Pada laporan tahunan yang dibuat oleh perusahaan, dewan komisaris hanya mempunyai kewenangan menyetujui bahwa laporan tahunan tersebut sesuai dengan standar dan layak untuk dipublikasikan tanpa memperhatikan apakah *annual report* yang dibuat sudah memberikan informasi tambahan mengenai akuntabilitas keuangan, sosial dan syariahnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari (Hasanah *et al.*, 2017; Rizfani dan Lubis, 2018) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas sosial perbankan syariah. Akan tetapi, hasil penelitian ini kontradiksi dengan hasil penelitian dari (Indrawaty dan Wardayaty, 2016; Kurniawati dan Yaya, 2017; Mukhibad, 2018) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan akuntabilitas sosial perbankan syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel profitabilitas, *leverage*, *investment account holder*, *size*, dewan pengawas syariah, dewan komisaris terhadap pengungkapan akuntabilitas pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan jumlah sample 8 bank syariah di Indonesia serta menggunakan metode analisis regresi data panel dan alat analisis *E-Views 09*.

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas pada bank syariah di Indonesia.
2. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas pada bank syariah di Indonesia.
3. *Investment account holder* (IAH) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas pada bank syariah di Indonesia.
4. *Size* perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas pada bank syariah di Indonesia.
5. Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas pada bank syariah di Indonesia.

6. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas di Indonesia.

5.2 Saran

Keterbatasan pada penelitian ini hanya menggunakan 8 bank syariah di Indonesia sebagai objek penelitian. Variabel independen yaitu profitabilitas, leverage investment account holder, size, dewan pengawas syariah dan dewan komisaris hanya mampu menerangkan variabel pengungkapan akuntabilitas sebesar 41,29 % dan sisanya 58,71% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, saran yang diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian antara lain :

1. Bagi perbankan syariah diharapkan lebih luas dalam melakukan pengungkapan akuntabilitasnya. Terutama dalam pengungkapan sosial , disarankan setiap perbankan syariah dapat mengelola dana zakat serta qard hasan dengan baik serta dapat melakukan aktivasi amal dan melakukan manajemen wakaf untuk karyawan dan nasabah. Selanjutnya untuk pengungkapan syariah disarankan DPS dapat menambahkan informasi terkait proses distribusi laba di bank yang mematuhi prinsip syariah, serta kegiatan perbankan yang tidak sesuai syariah dan bagaimana bank menghadapinya.
2. Bagi pihak eksternal disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan bank syariah agar tidak salah dalam pengambilan keputusan. Faktor yang dapat diperhatikan yaitu *size*

perbankan yang berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah.

3. Penelitian selanjutnya bisa menambahkan objek penelitian sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian dan kesimpulan yang lebih valid.
4. Penilaian *content analysis* pada variabel pengungkapan akuntabilitas dinilai masih subjektif. Peneliti menggunakan 3 penilaian *content analysis* dan menghitung rata-rata penilaian untuk mendapatkan skor pada pengungkapan akuntabilitas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan mengurangi tingkat subjektifitas pada penilaian pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial dan syariah).
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain sebagai penentu pengungkapan akuntabilitas mengingat masih terdapat 58,71% faktor lain diluar penelitian yang diduga dapat mempengaruhi pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial dan syariah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, W. A. W., Percy, M., & Stewart, J. (2013). Shari'ah disclosures in Malaysian and Indonesian Islamic banks The Shari'ah governance system. *Journal of Islamic Accounting Ang Business Research*, 4(2), 100–131.
- Affandi, H., & Nursita, M. (2019). Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan: Sebuah Analisis Islamic Social Reporting (ISR) pada Perusahaan yang Terdaftar di JII. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(1), 1–11. <https://doi.org/10.31334/bijak.v16i1.318>
- Albarak, H., & Sherif, E.-H. (2019). AAOIFI Governance Standards: Sharia Disclosure and Financial Performance for Islamic Banks. *Journal of Governance and Regulation*, 8(1), 19–37.
- Archer, S., Karim, R. A. abdel, & Al-Deehani, T. (1998). Financial Contracting, Governance Structures and The Accounting Regulation of Islamic Banks : An Analysis in Terms of Agency Theory and Transaction Cost Economics. *Journal of Management and Governance*, 1–32.
- Baydoun, N., & Willet, R. (2000). Islamic Corporate Reports. *Abacus*, 36(1), 71–90.
- Brigham, E. ., & Weston, J. . (1993). *Manajemen Keuangan, Edisi Kesembilan*. Erlangga.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen Keuanagn* (Edisi 11). Erlangga.
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). Determinants of compliance with AAOIFI standards by Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 143–168.
- Farook, S., Kabir Hassan, M., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141. <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>
- Godfrey, Jayne . (2010). *Accounting Theory* (7th Edition). John Wiley & Sons: Australia
- Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). WPS4054 Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services. *World Bank Policy Research Paper*, 4054(7), 1–32.
- Harahap, S. S. (2007). *Teori Akuntansi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hasanah, N. T., Widiyanti, N. W., & Sudarno, S. (2017). Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2, 115–120.

- Hery. (2017). *Kajian Riset Akuntansi*. PT Grasindo.
- Indrawaty, & Wardayati, S. M. (2016). Implementing Islamic Corporate Governance (ICG) and Islamic Social Reporting (ISR) in Islamic Financial Institution (IFI). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 338–343. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.042>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Juhmani, O. (2014). Determinants of Corporate Social and Environmental Disclosure on Websites: the Case of Bahrain. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 2(4), 77–87. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2014.020402>
- Khairandy R, & Malik, C. (2007). *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Total Medis Yogyakarta.
- Kurniawati, M., & Yaya, R. (2017). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 163–171. <https://doi.org/10.18196/jai.180280>
- Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 157–174.
- Maali, B., Casson, P., & C, N. (2006). Social reporting by Islamic Banks. *Abacus*, 42(2), 266–289.
- Marharani, A., & Yulianto, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9746>
- Marsuki. (2010). *Analisis Kritis Laporan Keuangan Bank Sentral ASEAN, ASIA dan EROPA*. Mitra Wacana Media.
- Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 299–311.
- Munawir, S. (2007). *Analisis Laporan Keuangan*. Liberty Yogyakarta.
- Muslich, M. (2003). *Manajemen Keuangan Modern Analisis, Perencanaan, dan Kebijaksanaan*. PT Bumi Aksara.
- Nuraeni, A., & Rini. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 77–82.
- Pratama, A. N. A., Muchlis, S., & Wahyuni, I. (2018). Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perbankan Syariah Dengan Komisariss

- Independen Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2, 103–115.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rachmawati, S. (2016). Pengaruh Pengungkapan Sukarela Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Koefisien Respon Laba. *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 16(2), 141–160.
- Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), 65–104.
- Rizfani, K. N., & Lubis, D. (2018). Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perusahaan di Jakarta Islamic Index. *Al-Muzara'ah*, 6(2), 103–116.
- Rosiana, R., Arifin, B., & Hamdani, M. (2015). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN ISLAMIC GOVERNANCE SCORE TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(1), 87–104.
- Sakti, I. (2018). Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews. *Modul Eviews* 9, 1–25.
- Sherif, E.-H., Khaled, H., Mohamed, M., & Hussien, M. (2018). the Determinants of Financial, Social and Sharia Disclosure Accountability for Islamic Banks. *Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions*, 8(3), 21–42.
- Sunarto, C. N. (2016). Shariah Governance dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting Index dan Global Reporting Index pada Perbankan Syariah Periode 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 30–57.
- Sutapa, & Laksito, H. (2018). Peran Islamic Social Reporting Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(1), 57–68.
- Suwardjono. (2017). *Teori Akuntansi Perekayasa Pelaporan Keuangan*.
- Triyuwono, I. (2011). Mengangkat “Sing Liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(2), 186–200.
- Umiyati, & Baiquni, M. D. (2018). Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(1), 85–104.
<https://doi.org/10.35836/jakis.v6i1.10>
- Wahyudin, A. (2015). *Metodologi Penelitian*. Unnes.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis, edisi kedua*. Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.
- Yusoff, H., Azhari, N. K. M., & Darus, F. (2018). Effects of Financial Performance

and Governance on Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from Islamic Financial Institutions in Malaysia. *Global Journal Al Thaqafah*, 8(1), 57–72. <https://doi.org/10.7187/gjatsi2018-04>

Zanjabil, A., & Adityawarman. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–13. <https://doi.org/10.15294/aaj.v4i4.9119>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Perusahaan Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Bank
1	BMI	PT BANK MUAMALAT INDONESIA
2	BRIS	PT BANK BRI SYARIAH
3	BNIS	PT BANK BNI SYARIAH
4	BSM	PT BANK SYARIAH MANDIRI
5	BMS	PT BANK MEGA SYARIAH
6	BPS	PT BANK PANIN SYARIAH
7	BBS	PT BANK BUKOPIN SYARIAH
8	BCAS	PT BANK BCA SYARIAH

Lampiran 2 Data Tabulasi Financial, Social, and Sharia Disclosure Accountability

NO	KODE	NAMA BANK	TAHUN	DISCLOSURE
1	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2011	0,74
2	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2012	0,64
3	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2013	0,68
4	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2014	0,77
5	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2015	0,76
6	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2016	0,84
7	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2017	0,80
8	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2018	0,76
9	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2011	0,67
10	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2012	0,64
11	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2013	0,64
12	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2014	0,65
13	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2015	0,64
14	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2016	0,75
15	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2017	0,71
16	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2018	0,70
17	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2011	0,63
18	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2012	0,65
19	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2013	0,67
20	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2014	0,73
21	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2015	0,80
22	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2016	0,73
23	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2017	0,78
24	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2018	0,83

NO	KODE	NAMA BANK	TAHUN	DISCLOSURE
25	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2011	0,69
26	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2012	0,79
27	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2013	0,82
28	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2014	0,72
29	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2015	0,74
30	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2016	0,83
31	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2017	0,76
32	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2018	0,82
33	BMS	PT Bank Mega Syariah	2011	0,61
34	BMS	PT Bank Mega Syariah	2012	0,56
35	BMS	PT Bank Mega Syariah	2013	0,60
36	BMS	PT Bank Mega Syariah	2014	0,54
37	BMS	PT Bank Mega Syariah	2015	0,60
38	BMS	PT Bank Mega Syariah	2016	0,61
39	BMS	PT Bank Mega Syariah	2017	0,72
40	BMS	PT Bank Mega Syariah	2018	0,70
41	BPS	PT Bank Panin Syariah	2011	0,45
42	BPS	PT Bank Panin Syariah	2012	0,46
43	BPS	PT Bank Panin Syariah	2013	0,56
44	BPS	PT Bank Panin Syariah	2014	0,62
45	BPS	PT Bank Panin Syariah	2015	0,59
46	BPS	PT Bank Panin Syariah	2016	0,72
47	BPS	PT Bank Panin Syariah	2017	0,60
48	BPS	PT Bank Panin Syariah	2018	0,60
49	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2011	0,57
50	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2012	0,58
51	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2013	0,58
52	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2014	0,67
53	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2015	0,65
54	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2016	0,72
55	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2017	0,70
56	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2018	0,68
57	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2011	0,61
58	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2012	0,61
59	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2013	0,59
60	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2014	0,59
61	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2015	0,59
62	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2016	0,62

NO	KODE	NAMA BANK	TAHUN	DISCLOSURE
63	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2017	0,62
64	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2018	0,67

Lampiran 3 Data Tabulasi Profitabilitas

NO	KODE	NAMA BANK	TAHUN	ROA
1	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2011	1,52
2	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2012	1,54
3	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2013	0,50
4	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2014	0,17
5	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2015	0,20
6	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2016	0,22
7	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2017	0,11
8	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2018	0,08
9	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2011	0,20
10	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2012	1,19
11	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2013	1,15
12	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2014	0,08
13	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2015	0,76
14	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2016	0,95
15	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2017	0,51
16	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2018	0,43
17	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2011	1,29
18	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2012	1,48
19	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2013	1,37
20	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2014	1,27
21	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2015	1,43
22	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2016	1,44
23	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2017	1,31
24	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2018	1,42
25	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2011	1,95
26	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2012	2,25
27	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2013	1,53
28	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2014	-0,04
29	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2015	0,56
30	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2016	0,59
31	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2017	0,59
32	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2018	0,88
33	BMS	PT Bank Mega Syariah	2011	1,58

NO	KODE	NAMA BANK	TAHUN	ROA
34	BMS	PT Bank Mega Syariah	2012	3,81
35	BMS	PT Bank Mega Syariah	2013	2,33
36	BMS	PT Bank Mega Syariah	2014	0,29
37	BMS	PT Bank Mega Syariah	2015	0,30
38	BMS	PT Bank Mega Syariah	2016	2,63
39	BMS	PT Bank Mega Syariah	2017	1,56
40	BMS	PT Bank Mega Syariah	2018	0,93
41	BPS	PT Bank Panin Syariah	2011	2,06
42	BPS	PT Bank Panin Syariah	2012	3,48
43	BPS	PT Bank Panin Syariah	2013	1,03
44	BPS	PT Bank Panin Syariah	2014	1,99
45	BPS	PT Bank Panin Syariah	2015	1,14
46	BPS	PT Bank Panin Syariah	2016	0,37
47	BPS	PT Bank Panin Syariah	2017	-10,77
48	BPS	PT Bank Panin Syariah	2018	0,26
49	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2011	0,52
50	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2012	0,55
51	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2013	0,69
52	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2014	0,27
53	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2015	0,79
54	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2016	-1,12
55	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2017	0,02
56	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2018	0,04
57	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2011	0,90
58	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2012	0,80
59	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2013	1,00
60	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2014	0,80
61	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2015	1,00
62	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2016	1,10
63	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2017	1,20
64	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2018	1,20

Lampiran 4 Data Tabulasi *Leverage*

NO	KODE	NAMA BANK	TAHUN	DAR
1	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2011	13,16
2	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2012	18,09
3	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2013	18,06
4	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2014	15,16
5	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2015	15,66
6	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2016	16,99
7	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2017	16,18
8	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2018	16,52
9	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2011	19,91
10	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2012	24,36
11	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2013	25,89
12	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2014	27,57
13	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2015	26,50
14	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2016	30,57
15	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2017	28,85
16	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2018	31,37
17	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2011	15,38
18	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2012	20,53
19	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2013	26,10
20	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2014	15,82
21	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2015	14,38
22	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2016	16,55
23	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2017	18,99
24	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2018	23,84
25	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2011	15,42
26	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2012	14,47
27	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2013	16,91
28	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2014	17,24
29	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2015	12,94
30	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2016	14,04
31	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2017	14,25
32	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2018	14,72
33	BMS	PT Bank Mega Syariah	2011	32,69
34	BMS	PT Bank Mega Syariah	2012	25,93
35	BMS	PT Bank Mega Syariah	2013	20,89
36	BMS	PT Bank Mega Syariah	2014	18,35
37	BMS	PT Bank Mega Syariah	2015	16,81

NO	KODE	NAMA BANK	TAHUN	DAR
38	BMS	PT Bank Mega Syariah	2016	10,66
39	BMS	PT Bank Mega Syariah	2017	18,51
40	BMS	PT Bank Mega Syariah	2018	12,77
41	BPS	PT Bank Panin Syariah	2011	2,80
42	BPS	PT Bank Panin Syariah	2012	9,78
43	BPS	PT Bank Panin Syariah	2013	9,93
44	BPS	PT Bank Panin Syariah	2014	14,29
45	BPS	PT Bank Panin Syariah	2015	11,79
46	BPS	PT Bank Panin Syariah	2016	11,64
47	BPS	PT Bank Panin Syariah	2017	7,58
48	BPS	PT Bank Panin Syariah	2018	9,74
49	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2011	18,04
50	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2012	25,04
51	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2013	23,46
52	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2014	16,08
53	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2015	15,04
54	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2016	18,72
55	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2017	21,39
56	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2018	20,18
57	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2011	15,63
58	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2012	16,03
59	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2013	13,47
60	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2014	10,83
61	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2015	9,05
62	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2016	8,40
63	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2017	12,52
64	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2018	10,95

Lampiran 5 Data Tabulasi *Investment Account Holder*

NO	KODE	NAMA BANK	TAHUN	IAH
1	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2011	31,80
2	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2012	41,71
3	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2013	36,73
4	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2014	44,34
5	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2015	40,48
6	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2016	38,69
7	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2017	41,84
8	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2018	39,74
9	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2011	8,18
10	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2012	9,79
11	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2013	7,57
12	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2014	8,81
13	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2015	7,82
14	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2016	8,45
15	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2017	10,03
16	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2018	4,32
17	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2011	6,08
18	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2012	7,08
19	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2013	9,56
20	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2014	9,63
21	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2015	11,65
22	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2016	14,08
23	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2017	9,76
24	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2018	10,80
25	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2011	32,69
26	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2012	27,69
27	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2013	31,95
28	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2014	35,71
29	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2015	27,34
30	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2016	30,58
31	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2017	26,81
32	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2018	25,24
33	BMS	PT Bank Mega Syariah	2011	10,38
34	BMS	PT Bank Mega Syariah	2012	17,02
35	BMS	PT Bank Mega Syariah	2013	10,39
36	BMS	PT Bank Mega Syariah	2014	6,45
37	BMS	PT Bank Mega Syariah	2015	4,87

NO	KODE	NAMA BANK	TAHUN	IAH
38	BMS	PT Bank Mega Syariah	2016	5,22
39	BMS	PT Bank Mega Syariah	2017	5,35
40	BMS	PT Bank Mega Syariah	2018	6,13
41	BPS	PT Bank Panin Syariah	2011	11,92
42	BPS	PT Bank Panin Syariah	2012	3,20
43	BPS	PT Bank Panin Syariah	2013	6,25
44	BPS	PT Bank Panin Syariah	2014	4,32
45	BPS	PT Bank Panin Syariah	2015	5,20
46	BPS	PT Bank Panin Syariah	2016	6,60
47	BPS	PT Bank Panin Syariah	2017	7,55
48	BPS	PT Bank Panin Syariah	2018	2,61
49	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2011	4,40
50	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2012	5,41
51	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2013	6,73
52	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2014	5,89
53	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2015	5,75
54	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2016	5,77
55	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2017	4,52
56	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2018	3,97
57	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2011	2,41
58	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2012	3,51
59	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2013	4,90
60	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2014	3,43
61	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2015	3,00
62	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2016	3,60
63	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2017	4,09
64	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2018	5,05

Lampiran 6 Data Tabulasi Ukuran Perusahaan (Size)

NO	KODE	NAMA BANK	TAHUN	Size
1	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2011	31,11
2	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2012	31,43
3	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2013	31,61
4	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2014	31,76
5	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2015	31,68
6	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2016	31,65
7	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2017	31,75
8	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2018	31,68
9	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2011	30,05
10	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2012	30,28
11	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2013	30,49
12	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2014	30,64
13	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2015	30,82
14	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2016	30,95
15	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2017	31,08
16	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2018	31,27
17	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2011	29,77
18	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2012	30,00
19	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2013	30,32
20	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2014	30,60
21	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2015	30,77
22	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2016	30,97
23	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2017	31,18
24	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2018	31,35
25	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2011	31,52
26	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2012	31,62
27	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2013	31,79
28	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2014	31,83
29	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2015	31,88
30	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2016	32,00
31	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2017	32,11
32	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2018	22,22
33	BMS	PT Bank Mega Syariah	2011	29,35
34	BMS	PT Bank Mega Syariah	2012	29,73
35	BMS	PT Bank Mega Syariah	2013	29,84
36	BMS	PT Bank Mega Syariah	2014	29,58
37	BMS	PT Bank Mega Syariah	2015	29,35

NO	KODE	NAMA BANK	TAHUN	Size
38	BMS	PT Bank Mega Syariah	2016	29,45
39	BMS	PT Bank Mega Syariah	2017	29,58
40	BMS	PT Bank Mega Syariah	2018	29,62
41	BPS	PT Bank Panin Syariah	2011	27,65
42	BPS	PT Bank Panin Syariah	2012	28,39
43	BPS	PT Bank Panin Syariah	2013	29,03
44	BPS	PT Bank Panin Syariah	2014	29,46
45	BPS	PT Bank Panin Syariah	2015	29,60
46	BPS	PT Bank Panin Syariah	2016	29,80
47	BPS	PT Bank Panin Syariah	2017	29,79
48	BPS	PT Bank Panin Syariah	2018	29,80
49	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2011	28,64
50	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2012	28,92
51	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2013	29,10
52	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2014	29,27
53	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2015	29,39
54	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2016	29,58
55	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2017	29,60
56	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2018	29,48
57	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2011	27,83
58	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2012	28,10
59	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2013	28,34
60	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2014	28,73
61	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2015	29,10
62	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2016	29,24
63	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2017	29,42
64	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2018	29,59

Lampiran 7 Data Tabulasi Dewan Pengawas Syariah

NO	KODE	NAMA BANK	TAHUN	DPS
1	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2011	7,67
2	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2012	8,00
3	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2013	8,00
4	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2014	8,00
5	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2015	8,00
6	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2016	8,00
7	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2017	8,00
8	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2018	8,00
9	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2011	6,50
10	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2012	6,50
11	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2013	6,50
12	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2014	6,50
13	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2015	6,50
14	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2016	6,50
15	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2017	6,50
16	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2018	6,50
17	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2011	6,50
18	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2012	7,00
19	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2013	7,00
20	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2014	7,00
21	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2015	7,00
22	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2016	7,00
23	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2017	7,00
24	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2018	7,00
25	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2011	8,00
26	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2012	8,00
27	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2013	8,00
28	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2014	8,33
29	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2015	8,33
30	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2016	9,00
31	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2017	9,00
32	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2018	9,00
33	BMS	PT Bank Mega Syariah	2011	7,00
34	BMS	PT Bank Mega Syariah	2012	8,00
35	BMS	PT Bank Mega Syariah	2013	8,00
36	BMS	PT Bank Mega Syariah	2014	8,00
37	BMS	PT Bank Mega Syariah	2015	8,00

NO	KODE	NAMA BANK	TAHUN	DPS
38	BMS	PT Bank Mega Syariah	2016	8,00
39	BMS	PT Bank Mega Syariah	2017	7,50
40	BMS	PT Bank Mega Syariah	2018	7,50
41	BPS	PT Bank Panin Syariah	2011	6,50
42	BPS	PT Bank Panin Syariah	2012	6,50
43	BPS	PT Bank Panin Syariah	2013	6,50
44	BPS	PT Bank Panin Syariah	2014	6,50
45	BPS	PT Bank Panin Syariah	2015	6,50
46	BPS	PT Bank Panin Syariah	2016	6,50
47	BPS	PT Bank Panin Syariah	2017	6,50
48	BPS	PT Bank Panin Syariah	2018	6,50
49	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2011	8,00
50	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2012	7,00
51	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2013	7,00
52	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2014	7,00
53	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2015	7,00
54	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2016	7,00
55	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2017	7,00
56	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2018	7,00
57	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2011	7,00
58	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2012	7,00
59	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2013	7,00
60	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2014	7,00
61	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2015	6,50
62	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2016	6,50
63	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2017	6,50
64	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2018	6,50

Lampiran 8 Data Tabulasi Dewan Komisaris

NO	KODE	NAMA BANK	TAHUN	DEKOM
1	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2011	6,00
2	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2012	6,00
3	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2013	6,00
4	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2014	6,00
5	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2015	6,00
6	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2016	4,00
7	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2017	5,00
8	BMI	PT Bank Muamalat Indonesia	2018	5,00
9	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2011	4,00
10	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2012	5,00
11	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2013	5,00
12	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2014	5,00
13	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2015	5,00
14	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2016	5,00
15	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2017	4,00
16	BRIS	PT Bank BRI Syariah	2018	4,00
17	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2011	3,00
18	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2012	3,00
19	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2013	3,00
20	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2014	3,00
21	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2015	3,00
22	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2016	4,00
23	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2017	4,00
24	BNIS	PT Bank BNI Syariah	2018	5,00
25	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2011	5,00
26	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2012	4,00
27	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2013	4,00
28	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2014	5,00
29	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2015	5,00
30	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2016	5,00
31	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2017	4,00
32	BSM	PT Bank Syariah Mandiri	2018	4,00
33	BMS	PT Bank Mega Syariah	2011	3,00
34	BMS	PT Bank Mega Syariah	2012	3,00
35	BMS	PT Bank Mega Syariah	2013	3,00
36	BMS	PT Bank Mega Syariah	2014	3,00
37	BMS	PT Bank Mega Syariah	2015	3,00

NO	KODE	NAMA BANK	TAHUN	DEKOM
38	BMS	PT Bank Mega Syariah	2016	3,00
39	BMS	PT Bank Mega Syariah	2017	3,00
40	BMS	PT Bank Mega Syariah	2018	3,00
41	BPS	PT Bank Panin Syariah	2011	3,00
42	BPS	PT Bank Panin Syariah	2012	3,00
43	BPS	PT Bank Panin Syariah	2013	3,00
44	BPS	PT Bank Panin Syariah	2014	3,00
45	BPS	PT Bank Panin Syariah	2015	3,00
46	BPS	PT Bank Panin Syariah	2016	4,00
47	BPS	PT Bank Panin Syariah	2017	4,00
48	BPS	PT Bank Panin Syariah	2018	3,00
49	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2011	3,00
50	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2012	3,00
51	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2013	3,00
52	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2014	3,00
53	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2015	4,00
54	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2016	4,00
55	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2017	4,00
56	BBS	PT Bank Bukopin Syariah	2018	4,00
57	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2011	3,00
58	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2012	3,00
59	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2013	3,00
60	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2014	3,00
61	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2015	3,00
62	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2016	3,00
63	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2017	3,00
64	BCAS	PT Bank BCA Syariah	2018	3,00

BNIS	2018	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	13
	2017	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	13
	2016	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	13
	2015	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	13
	2014	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	12
	2013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	14
	2012	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	13
	2011	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	13
BCAS	2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	14
	2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	14
	2016	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	13
	2015	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	13
	2014	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	13
	2013	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	13
	2012	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	14
	2011	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	14

Lampiran 10 Content Analysis Social Disclosure

KODE BANK	TAHUN	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JUMLAH
BSM	2018	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	8
	2017	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	7
	2016	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	7
	2015	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	7
	2014	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	7
	2013	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	8
	2012	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	8
	2011	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	6
BBS	2018	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	6
	2017	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	7
	2016	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	6
	2015	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5
	2014	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5
	2013	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	4
	2012	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	4
	2011	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	5
BMI	2018	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	6
	2017	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	8
	2016	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	8
	2015	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	7
	2014	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	7
	2013	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	5
	2012	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	6
	2011	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	8

BPS	2018	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4
	2017	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4
	2016	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	6
	2015	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3
	2014	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	4
	2013	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3
	2012	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3
	2011	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3
BRIS	2018	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	6
	2017	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	7
	2016	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	7
	2015	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	6
	2014	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	5
	2013	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	4
	2012	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	4
	2011	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	5
BMS	2018	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	7
	2017	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	8
	2016	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5
	2015	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4
	2014	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3
	2013	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	4
	2012	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	4
	2011	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3

BNIS	2018	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	9
	2017	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	8
	2016	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	7
	2015	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	8
	2014	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	7
	2013	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	6
	2012	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	5
	2011	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	5
BCAS	2018	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	5
	2017	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4
	2016	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4
	2015	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4
	2014	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4
	2013	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4
	2012	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4
	2011	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4

Lampiran 11 Content Analysis Sharia Disclosure

KODE BANK	TAHUN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	JUMLAH	
BSM	2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	14	
	2017	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	12	
	2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	16	
	2015	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	11	
	2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	
	2013	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	14	
	2012	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	12	
	2011	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	10	
	BBS	2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	12
		2017	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	11
2016		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	13	
2015		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12	
2014		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	13	
2013		1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	11	
2012		1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	11	
2011		1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	11	
BMI		2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	14
		2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	13
	2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	15	
	2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	12	
	2014	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	13	
	2013	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	11	
	2012	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	12	
	2011	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	13	
	BPS	2018	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	12
		2017	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	11
2016		1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	13	
2015		1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	11	
2014		1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	11	
2013		1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	9	
2012		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	
2011		1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	8
BRIS		2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	13
		2017	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	12
	2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	13	
	2015	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	11	
	2014	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	12	
	2013	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	13	
	2012	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	13	
	2011	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	13	
	BMS	2018	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	11
		2017	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	12
2016		1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	11	
2015		1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	11	
2014		1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	9	
2013		1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	11	
2012		1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	10	
2011		1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	13	

Lampiran 13 Hasil Output Eviews 9 untuk *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.514188	0.289294	-5.234086	0.0000
ROA	-0.001425	0.004164	-0.342285	0.7334
LEVERAGE	-0.000684	0.001256	-0.544659	0.5881
IAH	-0.000984	0.001230	-0.800086	0.4270
SIZE	0.000733	0.000103	7.110008	0.0000
DPS	0.004377	0.013980	0.313113	0.7553
DEKOM	-0.008181	0.012268	-0.666901	0.5075
R-squared	0.678047	Mean dependent var		0.671406
Adjusted R-squared	0.644157	S.D. dependent var		0.088297
S.E. of regression	0.052672	Akaike info criterion		-2.946563
Sum squared resid	0.158135	Schwarz criterion		-2.710435
Log likelihood	101.2900	Hannan-Quinn criter.		-2.853540
F-statistic	20.00738	Durbin-Watson stat		1.229908
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 14 Hasil Output Eviews 9 untuk *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.716510	0.476044	-3.605778	0.0007
ROA	-0.001159	0.004067	-0.285012	0.7768
LEVERAGE	-0.001074	0.001751	-0.613361	0.5424
IAH	-0.001941	0.002353	-0.825004	0.4133
SIZE	0.000848	0.000149	5.709476	0.0000
DPS	-0.013996	0.023738	-0.589629	0.5581
DEKOM	-0.006564	0.013173	-0.498314	0.6204
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.761957	Mean dependent var		0.671406
Adjusted R-squared	0.700065	S.D. dependent var		0.088297
S.E. of regression	0.048357	Akaike info criterion		-3.029767
Sum squared resid	0.116921	Schwarz criterion		-2.557511
Log likelihood	110.9525	Hannan-Quinn criter.		-2.843721
F-statistic	12.31121	Durbin-Watson stat		1.629650
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 15 Hasil Output Eviews 9 untuk *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.733880	0.400862	-4.325385	0.0001
ROA	-0.001119	0.004002	-0.279582	0.7808
LEVERAGE	-0.001131	0.001631	-0.693399	0.4909
IAH	-0.001517	0.001695	-0.895251	0.3744
SIZE	0.000840	0.000135	6.231090	0.0000
DPS	-0.008467	0.020682	-0.409374	0.6838
DEKOM	-0.007037	0.012863	-0.547077	0.5865

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.061982	0.6216
Idiosyncratic random		0.048357	0.3784

Weighted Statistics			
R-squared	0.468884	Mean dependent var	0.178531
Adjusted R-squared	0.412977	S.D. dependent var	0.060016
S.E. of regression	0.045982	Sum squared resid	0.120520
F-statistic	8.386863	Durbin-Watson stat	1.589521
Prob(F-statistic)	0.000002		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.664126	Mean dependent var	0.671406
Sum squared resid	0.164972	Durbin-Watson stat	1.161219

Lampiran 16 Hasil Output Eviews 9 untuk *Chow Test*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.517849	(7,50)	0.0268
Cross-section Chi-square	19.325047	7	0.0072

Lampiran 17 Hasil Output Eviews 9 untuk Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.539312	6	0.9973

Lampiran 18 Hasil Output Eviews 9 untuk Uji Multikolinearitas

	ROA	LEVERAGE	IAH	SIZE	DPS	DEKOM
ROA	1	0.121611544 8810422	0.001916866 202979159	- 0.049535022 19905776	0.095232758 27108458	- 0.155316929 3835013
LEVERAGE	0.121611544 8810422	1	- 0.053065742 39883591	0.225772041 692655	- 0.081051577 78551786	0.208145543 6030271
IAH	0.001916866 202979159	- 0.053065742 39883591	1	0.772072397 7691019	0.704565027 3852536	0.728810321 0274257
SIZE	- 0.049535022 19905776	0.225772041 692655	0.772072397 7691019	1	0.546438453 9710308	0.732177855 6252353
DPS	0.095232758 27108458	- 0.081051577 78551786	0.704565027 3852536	0.546438453 9710308	1	0.333219305 0930436
DEKOM	- 0.155316929 3835013	0.208145543 6030271	0.728810321 0274257	0.732177855 6252353	0.333219305 0930436	1

Lampiran 19 Hasil Output Eviews 9 untuk Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.424139	Prob. F(27,36)	0.1594
Obs*R-squared	33.05379	Prob. Chi-Square(27)	0.1953
Scaled explained SS	14.50947	Prob. Chi-Square(27)	0.9758